

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 260 TAHUN 2015 TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan

Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah

Oleh :

POPI MARKURI
NPM 1521020240

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/ 2019 M

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 260 TAHUN 2015 TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan

Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah

Oleh :

POPI MARKURI
NPM 1521020240

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H/ 2019 M

ABSTRAK

Kode etik mahasiswa merupakan seperangkat aturan yang berisi tentang kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. Keberadaan kode etik ini diharapkan mampu menjadikan pribadi mahasiswa yang berakhlakul karimah dan berintegritas tinggi. Kode etik ialah suatu perbuatan apa yang benar atau salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa dalam Perspektif Fiqh Siyasah ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yaitu Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pihak yang bersangkutan terdiri dari 407 orang, yaitu 396 mahasiswa, 9 dosen dan 2 Pimpinan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Sedangkan data sekunder diperoleh dari Buku Pedoman Akademik berkaitan dengan Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Analisis menggunakan metode kualitatif dan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa menurut perspektif fiqh siyasah khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, sudah berjalan namun tidak sesuai dengan kode etik yang dikeluarkan oleh Rektor dan terkait etika berpakaian banyak mahasiswa maupun mahasiswi yang berpakaian tidak sesuai dengan kode etik. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam berperilaku, faktor kebiasaan yang berkenaan dengan lingkungan seperti latar belakang pendidikan sebelumnya dan keluarga, faktor perkembangan zaman yang mempengaruhi dalam mengikuti mode terbaru terutama segi berpakaian dan sanksi yang ditetapkan dalam kode etik berpakaian tidak tegas.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703278

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Popi Markuri

NPM : 1521020240

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260
Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa
(Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung)

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Chaidir Nasution, M.H. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
NIP. 195802011986031002 NIP. 197304142000032002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah**


Dr. Nurnazli, S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703278

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)

Disusun oleh Popi Markuri NPM 1521020240 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. (...)

Sekretaris : Erik R Gumiri, M.H. (...)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (...)

Penguji II : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. (...)



**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (ق.س:النساء: [٤]: ٥٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (QS: An-Nisa [4]: 59).¹



¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, Cet. 6, 2016), h. 88

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Orang yang paling berjasa dalam hidupku yaitu kedua orang tuaku tercinta, yaitu Bapak Wahab dan Ibunda Jamila yang telah menyayangi, mengasihi, dan mendidik, serta medoakan penulis untuk meraih kesuksesan, oleh karena itu atas segala pengorbanannya mungkin tidak bisa dibalas dengan apapun jua.
2. Kakakku Iwan Darmawan, Bedi Saputra, Mira Wati dan Adikku Frengki Aji Saputra, terimakasih atas segala do'a dukungan dan kasih sayang.
3. Guru dan dosen yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat baik dunia maupun akhirat.
4. Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Popi Markuri, anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Wahab dan Ibunda Jamila. Lahir di Palembang pada tanggal 23 Februari 1997 dan mempunyai tiga kakak kandung Iwan Darmawan, Bedi Saputra, Mira Wati dan Adik kandung Frengki Aji Saputra.

Pendidikan dimulai dari SD Negeri 01 Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2003 dan selesai tahun 2009. SMP Negeri 07 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2009 dan selesai tahun 2012. SMK Negeri 01 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2012 dan selesai tahun 2015. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Program Studi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) pada Fakultas Syari'ah tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.

Selama menempuh pendidikan penulis bergabung beberapa organisasi intra kampus, yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Generasi Emas Mahasiswa Syari'ah (UKM-F GEMAIS) menjabat sebagai Anggota Bidang Riset Keilmuwan periode 2017-2018, Sekretaris Bidang Riset Keilmuwan periode 2018-2019, Jurnalis Komunitas Mata Pena 2017-2019.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa dalam Perspektif Fiqh Siyasah” (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Strata (S1) Jurusan Siyasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. Nurnazli, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Siyasah dan Frenki, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. selaku Pembimbing I dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pimpinan Fakultas Syari'ah serta Dosen dan Mahasiswa Fakultas Syari'ah yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancari.
5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
6. Sahabat Rimbi Fadhila Tunnisa dan Team kosan Bapak Simbolon, Mba Eka Yuni Prastiwi, S.pd., Alfiaturrohmaniah, Annisa Pratiwi Ningtiyas, Ayuni Nursanti yang telah membantu dan selalu ada disaat saya membutuhkan.
7. Sahabat LDK (Lembaga Dakwah Kampus) terimakasih sudah banyak memberi pembelajaran baik dunia dan akhirat.
8. Keluarga KKN 24 terimakasih atas semangatnya dan kekompakannya.
9. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini khususnya teman-teman angkatan 2015 jurusan Siyasah terutama kelas C yang saya sayangi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun, penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 10 September 2019
Penulis,

Popi Markuri
NPM.1521020240



DAFTAR ISI

JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikan Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II FIQH SIYASAH DAN ETIKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	16
1. Pengertian Fiqh Siyasah	16
2. Obyek dan Metode Pembahasan Fiqh Siyasah	20
3. Bidang-bidang Fiqh Siyasah	25
B. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematisasi Ajaran Islam	27
C. Tugas dan Fungsi Pemimpin	30
D. Etika dalam Islam.....	39
1. Kerangka Dasar Ajaran Islam	39
2. Etika, Moral, dan Susila	44
3. Pembentukan Perilaku	47
4. Macam-macam Akhlak	50
a. Akhlak Mahmudah.....	50
b. Akhlak Mazmumah	54

BAB III GAMBARAN UMUM UIN RADEN INTAN LAMPUNG

A. Sejarah UIN Raden Intan Lampung.....	58
B. Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Mahasiswa	67
C. Pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa	69

BAB IV IMPLEMENTASI KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 260 TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.....	77
---	-----------

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi	83

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

- Lampiran 1 Blangko Konsultasi
- Lampiran 2 Permohonan Izin Riset
- Lampiran 3 Rekomendasi Penelitian Kesbangpol
- Lampiran 4 Panduan Wawancara
- Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Responden
- Lampiran 6 SK Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jawaban 396 Responden terhadap Kode Etik	76
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul proposal ini, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam proposal yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN REKTORNOMOR 260 TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)”** yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti pelaksanaan, penerapan adalah pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang di sepakati dulu.¹Implementasi yang dimaksud dalam judul ini adalah tentang pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

2. Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015

Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 adalah sekumpulan peraturan tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung bahwa salah satu tujuan UIN Raden Intan Lampung sebagaimana

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 529

ditetapkan dalam Statuta UIN Raden Intan Lampung untuk menghasilkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang bermoral dan memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.²

3. Kode Etik

Kode Etik adalah seperangkat norma dan peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan dan busana mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang telah ditetapkan oleh Rektor.³ Dalam hal ini, kode etik yang penulis kaji terkait cara berbusana mahasiswa/ mahasiswi UIN Raden Intan Lampung di lingkungan Fakultas Syariah.

4. Mahasiswa

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Instansi Pendidikan.⁴ Dimaksudkan mahasiswa disini adalah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau (pandangan) pendapat..⁵

6. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam

² Pedoman Akademik Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Lampung, h. 63

³ *Ibid.*, h. 64

⁴ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h.173

⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1989), h. 675

bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri.⁶ Karena itu, fiqh siyasah dalam pembahasan disini ialah pada siyasah syar'iyah.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul “Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)”, adalah upaya untuk melihat implementasi keputusan rektor nomor 260 tahun 2015 tentang kode etik mahasiswa Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dilihat dari sudut pandang Fiqh Siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk membahas masalah ini sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Berdasarkan fakta yang terlihat bahwa hampir setiap mahasiswa UIN Raden Intan Lampung khususnya di Fakultas Syariah kurang melaksanakan kewajibannya, baik aturan-aturan, larangan-larangan yang berkenaan dengan kode etik berpakaian sebagai mahasiswa maupun mahasiswa.

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 3-4

- b. Kajian tentang kode etik mahasiswa dibahas karena sesuai tuntutan mahasiswa harus berakhlakul karimah, demi mengetahui Implementasi Keputusan Rektor No. 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literature yang menunjang dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.
- b. Pemasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang Masalah

Kode etik mahasiswa merupakan seperangkat aturan yang berisi tentang kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. Keberadaan kode etik ini diharapkan mampu menjadikan pribadi mahasiswa yang berakhlakul karimah dan berintegritas tinggi. Kode etik ialah suatu perbuatan apa yang benar atau salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.⁷

Dalam pembentukan kode etik terhadap akhlak mahasiswa itu sendiri diperlukan implementasi agar terlaksananya aturan-aturan yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan

⁷Burhanuddin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 3

maupun nilai dan sikap. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Tidak hanya itu Islam pun mengajarkan pentingnya berakhlak, dalam Islam akhlak berasal dari kata “*khulq*” yang berarti perilaku, perangai atau tabiat. Maksud ini terkandung dalam kata-kata Aisyah yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah Saw yang artinya “*Akhlaknya (Rasulullah) adalah al-Qur'an*”⁸. Akhlak Rasulullah yang dimaksudkan ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah Saw yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al- Qur'an.

Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Islam secara tersirat di jumpai pada Mohammad Athiyah al-Abrasyi dalam bukunya *al-Tarbiyah al-Islamiyah*. Dalam bukunya tersebut al-Abrasyi menyatakan, bahwa pendidikan Islam ialah pendidikan yang ideal. Hal tersebut antara didasarkan pada adanya prinsip pembentukan akhlak yang mulia sebagai tujuan utama pendidikan Islam.⁹ Prinsip akhlak yang mulia ini dimaksud ialah berkaitan dengan prinsip-prinsip yang diletakkan Islam yang menerangkan pakaian ialah perhiasan. Secara umum Islam menentukan prinsip-prinsip pakaian yang boleh digunakan, ada empat prinsip umum sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub bahwa ada

⁸Jalaludin Rahmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqh* (Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2007), h., 43

⁹Abuddin Nata., *Op. Cit.*, h. 103

empat yaitu *pertama*, tutup aurat. *Kedua*, tidak ketat. *Ketiga*, tidak transparan. *Keempat*, tidak menyerupai lawan jenis.¹⁰

Prinsip berpakaian dalam Islam sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Karena itu, berpakaian bagi seorang muslim maupun muslimah memiliki nilai ibadah. Oleh karena itu, dalam berpakaian seseorang harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam berpakaian seseorang pun tidak dapat menentukan kepribadian secara mutlak, akan tetapi sedikit dari pakaian yang digunakan akan tercermin kepribadiannya dari cerminan lewat pakaian yang ia kenakan.

Islam secara jelas telah memberikan tuntunan dalam berpakaian secara Islami. Inilah salah satu etika yang layak diikuti bagi umat manusia. Petunjuk berpakaian dengan mengutamakan pada hijab syar'i. Artinya, seluruh umat manusia yang beragama Islam, maka harus senantiasa mengindahkan hal tersebut. Sebuah cerminan etika yang baik akan tampak dari diri seorang muslim ketika menutup bagian tubuhnya. Aurat adalah salah satunya.

Kemudian ditetapkannya Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung merupakan garis kebijakan yang mengingatkan kita kepada seorang pemikir fiqh siyasah kontemporer Muhammad Abduh, dalam kebijakannya selama menjabat sebagai Syekh atau Rektor Universitas Al-

¹⁰<https://bincangsyariah.com/nisa/empat-prinsip-berpakaian-dalam-islam/> (diakses pada tanggal 1 Juni 2019 jam 12.36)

Azhar di Mesir. Pada masa menjabat sebagai Rektor inilah ia mengadakan pembaharuan-pembaharuan di Universitas tersebut yang pengaruhnya sangat besar di dunia Islam. Dalam melakukan perbaikan, Muhammad Abduh memandang bahwa suatu perbaikan tidaklah selamanya datang melalui revolusi atau cara serupa. Seperti halnya perubahan sesuatu secara cepat dan drastis. Akan tetapi juga dilakukan melalui perbaikan metode pemikiran pada umat Islam. Melalui pendidikan, pembelajaran, dan perbaikan akhlak.

Kemudian Muhammad Abduh dikutip dalam Muhammad Iqbal berpendapat Islam juga mengatur hukum-hukum mengenai masalah-masalah hubungan antara sesama manusia. Agar hukum tersebut dapat berjalan efektif, maka dibutuhkan seorang pemimpin untuk melaksanakan serta mengawasi pelaksanaannya.¹¹

Berdasarkan hal ini kemudian penulis terkait untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 260 TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada BAB IV Larangan Pasal 7 huruf a. Kemudian Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa dalam Pespektif Fiqh Siyasah.

¹¹Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h. 31

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah nya adalah bagaimana implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa menurut perspektif fiqh siyasah ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa bagi Mahasiswa Fakultas Syariah.

G. Signifikasi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Secara teoritis yaitu untuk menambah khazanah kepustakaan bidang siyasah terkait Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa.
- 2) Secara praktis yaitu untuk acuan bagi Pimpinan UIN Raden Intan Lampung dalam menetapkan/ mengambil kebijakan khususnya terkait dengan kemahasiswaan.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap

permasalahan.¹² Untuk keperluan penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹³ Di sini penulis akan terjun ke lapangan di mana akan meneliti Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memeriksa untuk memperoleh kesimpulan.¹⁴

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya

¹²Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 2

¹³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 33

¹⁴ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya, 2014) hlm. 126

terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna melakukan wawancara dan *kuesioner* (angket). Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data atau informasi yang diambil dengan bantuan bermacam-macam materil yang terdapat dalam kepustakaan, dengan data ini maka dapat dikumpulkan data-data dengan membaca literatur-literatur, buku-buku referensi, struktur organisasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁵

c. Data Tersier

Merupakan data pelengkap kedua dari data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 32.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi (sasaran) penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶ Jadi populasi bukan hanya orang tetapi objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek dan subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau objek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 3.974 yang terdiri dari Mahasiswa, Dosen dan Pimpinan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

b. Sampel dan tehnik sampling

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk tehnik samplingnya peneliti menggunakan *random sampling* yaitu suatu tehnik pengambilan sampel atau elemen secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.¹⁷ Dalam tehnik sampling acak sederhana ini, perbedaan karakter yang mungkin ada pada

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA CV, 2015), h. 117

¹⁷Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014),h. 85

setiap unsur atau elemen populasi tidak menjadi hal yang bagi rencana analisisnya.

Dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman pada teori Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar (lebih dari 100 orang) dapat menggunakan sample. Menurutny sampel diambil antara 10% - 15% hingga 20% - 25% atau boleh lebih dari 25% dari jumlah populasi yang ada.¹⁸

Berdasarkan dokumentasi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, diketahui bahwa jumlah mahasiswa angkatan 2016, 2017, 2018 dengan jumlah 3963 mahasiswa. Berdasarkan tata cara pengambilan sampel di atas, sampel yang akan diambil adalah $10\% \times 3963 \text{ mahasiswa} = 396,3 \text{ mahasiswa}$. Jadi untuk memperoleh sampel yang dipilih Mahasiswa 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) orang, Dosen 9 (sembilan) orang, dan Pimpinan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2 (dua) orang, dengan jumlah sebanyak 407 orang dari populasi di atas maka digunakan tehnik tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian. Karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data, maka metode yang digunakan adalah :

a. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Op., Cit.*, h.112

dijawabnya.¹⁹ Kuesioner diberikan kepada responden yaitu mahasiswa/mahasiswi angkatan 2016, 2017, 2018 dipilih secara acak dari masing-masing jurusan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menggunakan jenis angket gabungan pertanyaan tertutup dan terbuka. Untuk pertanyaan tertutup, variasi jawaban telah disediakan oleh peneliti. Kemudian, peneliti meneruskannya dengan pertanyaan terbuka untuk mengetahui variasi jawaban yang akan muncul kemudian.²⁰

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode *interview* adalah metode atau pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.²¹ *Interview* dilakukan kepada para informan yaitu Dosen, dan Pimpinan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Agar wawancara yang dilakukan dapat terarah pelaksanaannya sesuai dengan pedoman melakukan wawancara, yaitu berupa garis besar materi wawancara yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.

¹⁹Sugiyono, *Op., Cit.* h. 199

²⁰Susiadi AS, *Op., Cit.*, h. 100

²¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc Jilid II.*, (Yogyakarta: Ando Offset, 2000) h. 192.

²²Lexi. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 135.

Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²³

5. Pengolahan Data

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁴
- b. *Koding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategori-kategori²⁵, atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan rumusan masalah.
- c. *Tabulasi*, adalah pekerjaan membuat table. Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukkan dalam table.²⁶
- d. Penyusunan atau Sistematis data (*constructing dan systematizing*), yaitu pengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.²⁷

²³*Ibid.*, h. 115

²⁴Lexi. J. Meleong, *Op., Cit.*, h. 122

²⁵*Ibid.*, h. 123

²⁶Susiadi AS, *Op., Cit.*, h. 124

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Cet, ke-1, h.9

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir *induktif* yakni metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki, maksudnya itu adalah penganalisaan terhadap data yang terkumpul dengan cara memecahkan kejadian-kejadian khusus kemudian ditarik pada kesimpulan yang umum.²⁸

Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.²⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang berkaitan dengan Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa serta dilihat dari perspektif fiqh siyasahnya. Kemudian mengevaluasi dengan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

²⁸Lexi. J. Meleong, *Op., Cit.*, h. 205

²⁹Soerjono Sorkanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), h.112

BAB II

FIQH SIYASAH DAN ETIKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab fikih atau *fiqh* dan siyasah. Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.³⁰

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah). Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.³¹

³⁰J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997) , Ed. 1, Cet. 3, h. 21

³¹*Ibid.*,h. 22

Kata *siyasat* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus besar Al-Munjid dan *Lisan al-‘Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan.³²

Secara terminologis dalam *Lisan al-‘ Arab*, *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemashlahatan.³³ Sedangkan di dalam *Al- Munjid* disebutkan, siyasah adalah membuat kemashlahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan.³⁴ Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahhab Khallaf (w.1956) mendefinisikannya sebagai “undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemashlahatan serta mengatur keadaan.”³⁵

Definisi lain dalam kerangka fiqih sebagai dikemukakan oleh Ibn al- Qayyim (w.751 H) yang dinukilnya dari Ibn ‘Aqil menyatakan: “Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemashlahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak

³² *Ibid.*, h. 23

³³ Abu al-fadhl al-Din Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-‘Arab*, Vol.VI. (Beirut: Dar Shadir, 1968), h. 108

³⁴ Lois Ma’luf, *Al- Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A’alam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 362

³⁵ Abd al- Wahab Khallaf, *Al- Siyasah al- Syar’iyyah* (Kairo: Dar Al- Ansar, 1977), h.4-5

menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.”³⁶ Definisi yang singkat dan padat dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahantsi yang menyatakan siyasah adalah “pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara’.”³⁷

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Tiga definisi pertama bersifat umum, yaitu siyasah yang tidak memperhatikan nilai-nilai syariat agama sekalipun tujuannya untuk mewujudkan kemashlahatan. Corak siyasah ini dikenal dengan istilah *siyasat wadh'iyat*, yaitu siyasah yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil oleh pemikiran manusia dalam mengatur kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan dua definisi terakhir bersifat khusus, yaitu siyasah yang berorientasi kepada nilai-nilai kewahyuan atau syariat. Corak siyasah ini dikenal dengan istilah *Siyasah Syar'iyah* atau Fikih Siyasah (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama), yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.

Senada dengan definisi tersebut Abdur Rahman Taj menyatakan :

“Siyasah Syar'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan

³⁶ Wahbah az- Zuhalli, *Ushul Fiqh Kuliyyat Da'wah Al Islam* (Jakarta: Radar Jaya Pratama: 1997), h. 89

³⁷ Ahmad Fathi Bahantsi (t.t), *al-Siyasah al-Jina'yyah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al- Fikr), h. 65

Negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash *tafshili* yang *juz'i* dalam al-Qur'an dan Sunnah.” Sedangkan Ibn Abidin membuat definisi yang lebih luas. Siyasah Syar'iyah adalah “kemashlahatan untuk manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan siyasah itu dari para nabi secara khusus dan umum baik zahir maupun batin, dan dari para pemegang kekuasaan, para sultan dan raja secara zahir serta dari para ulama ahli waris para nabi secara khusus pada batinnya.”³⁸

Dari uraian tentang pengertian istilah fiqh dan siyasat dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian Fikih Siyasah atau Siyasah Syar'iyah ialah ilmu yang amempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, praturan dan kebijaksanaan yang dianutt oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemashlahatan umat.”³⁹

³⁸ Abd al- Rahman Taj, *Al- Siyasah al- Syar'iyah wa al Fiqh al- Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993), h. 10

³⁹ *Ibid.*, h. 25-26

2. Obyek dan Metode Pembahasan Fiqh Siyasah

Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy:

Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan dari jurusan penadbirannya, dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap.⁴⁰

Hal yang sama pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf:

Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴¹

Sedangkan Ibn Taimiyah (w.728 H) mendasarkan obyek pembahasan bidang ilmu ini sebagaimana firman Allah SWT QS: An-Nisa’: 58-59

⁴⁰H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Ed. Rervisi, Cet. 4, h. 29

⁴¹*Ibid.*, h. 30

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (ق.س: النساء: [٤]: ٥٨)

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS: An-Nisa [4]: 58).⁴²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (ق.س: النساء: [٤]:
٥٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (QS: An-Nisa [4]: 59).⁴³

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintah); yang punya kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak; dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara pengusaha dan rakyat baik dari

⁴²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, Cet. 6, 2016), h. 88

⁴³Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 88

kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan RasulNya serta mematuhi pemerintah.⁴⁴

Tiga pandangan tersebut memberi gambaran bahwa obyek bahasan Fikih Siyasah secara garis besar adalah:

- a. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemashlahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemashlahatan.
- c. Mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, penerapan siyasah tidak boleh bertentangan dengan dalil yang bersifat kulliy, memiliki nilai universal, sekalipun ia terikat oleh traikan masa dan tempat tertentu. Oleh Karena itu, dibutuhkan sebuah metode, yang dapat menyantuni masalah-masalah yang bersifat kondisional dan situasional. Dengan kata lain, di pihak yang satu, mampu menyelesaikan masalah insaniyah; dan, di pihak yang lain, mampu menyesuaikan dengan nilai uluhiyah.⁴⁵

Metode yang digunakan dalam Fikih Siyasah untuk tujuan-tujuan tersebut tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fikih pada umumnya yaitu metode ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih. keduanya telah teruji keakuratannya dalam

⁴⁴Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al-Ra'iyat* (Dar al-Kutub al-Arabiyah, Bairut, 1966), h. 4

⁴⁵H.A. Djazuli, *Op., Cit.*, h. 31

menyelesaikan berbagai masalah. Metode ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih memiliki banyak alternative untuk dihadapkan dengan masalah-masalah yang timbul. Metode-metode ini memberikan kebebasan berpikir bagi penggunanya. Tapi ia harus merujuk kepada dalil-dalil kuli (umum) yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Dalil-dalil umum dijadikan sebagai alat control terhadap ketetapan produk berpikir. Metode pembahasan fikih siyasah adalah sebagai berikut:

a. *Qiyās* (Analogi)

Qiyās adalah penjelasan hukum terhadap sesuatu hal yang tidak ada penjelasan nash atas hukumnya dengan mengaitkannya dengan suatu hal yang ada nash hukumnya al-Qur'an dan Sunnah karena ada persamaan 'illat (sebab) hukum kedua hal tersebut.⁴⁶

Jadi *qiyās* bisa diterapkan dalam menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya bila ada persamaan illat hukum dengan suatu masalah yang jelas hukumnya dalam nash. Hal ini hanya dapat diketahui dengan logika, yaitu mengukur dan membandingkan antara masalah yang jelas hukumnya dan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, dalam hal illat hukumnya apakah sama atau tidak.

b. *Istihsan* (Memandang Lebih Baik)

Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalil umum. Dengan kata lain, meninggalkan satu dalil dan beralih kepada dalil yang kuat, atau membandingkan satu dalil dengan dalil lain untuk menetapkan hukum. Hal ini dilakukan untuk memilih yang lebih baik demi memenuhi tuntutan kemashlahatan dan tujuan syariat.⁴⁷

c. *Mashlahah Mursalah*

Kata *mashlahah* berarti kepentingan hidup manusia. Adapun kata *mursalah* berarti sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat yang menguatkan atau membatalkannya. *Mashlahah mursalah* yang disebut juga *istihslah* secara terminologis, menurut para ulama ushul, adalah *mashlahah* yang tidak ada ketetapanannya dalam

⁴⁶J.Suyuthi Pulungan, *op.,cit.*, h. 30

⁴⁷Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. 1, h. 188

nash yang membenarkan atau yang membatalkannya. Metode ini adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemashlahatan hidup manusia. Prinsipnya adalah menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara’.

Mashlahah mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum bila: 1) masalah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi dan melalui analisis dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah benar-benar member manfaat dan menghindarkan mudarat; 2) masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi bermanfaat untuk orang banyak; 3) masalah itu tidak bertentangan dengan nash dan terpenuhinya kepentingan hidup manusia serta terhindar dari kesulitan.

d. *Istishhab*

Istishhab adalah menjadikan ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Artinya mengembalikan segala sesuatu pada ketentuan semula selama tidak ada dalil nash yang mengharamkannya atau melarangnya, seperti hukum berbagai jenis hewan, benda, tumbuh-tumbuhan, makanan, minuman dan amal perbuatan yang tidak ada dalil syara’ yang menetapkan hukumnya, sehingga hukumnya adalah mubah atau halal.

Istihab antara lain pertama, memberlakukan ketetapan akal tentang bolehnya sesuatu jika tidak ditemui dalil yang mengubahnya, seperti contoh-contoh tersebut di atas. Kedua, tetap memberlakukan hukum syara’ berdasarkan ketentuan suatu dalil seperti seseorang yang sudah berwudhu, kemudian ia ragu-ragu apakah wudhunya sudah batal atau belum. Wudhunya belum batal atas dasar keyakinannya sudah berwudhu. Keraguan tidak menghilangkan keyakinan.

Dengan demikian, *istihhab* tidak melahirkan hukum baru dalam satu kasus, melainkan membut tetap berlakunya hukum akal mengenai kebolehan suatu hal selama tidak bertentangan dengan syara’ dan tetap memberlakukan hukum syara’ bagi suatu kasus atas dasar terpenuhinya sebab terjadinya hukum.⁴⁸

e. *‘Urf* atau Adat

‘Urf disebut pula dengan al-‘adah artinya kebiasaan. Hanya saja, di dalam *‘urf* ada yang berpendapat tidak ada kebiasaan yang menyimpang dari nash-nash Al-Qur’an dan hadis yang shahih,

⁴⁸*Ibid.*, h. 189

sedangkan dalam adat ada kebiasaan yang shahih dan ada pula yang fasid, yakni yang bertentangan dengan syariat Islam yang telah ditetapkan kedudukannya oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴⁹

Dalam hukum Islam, adat itu dibagi dua, yaitu:

- 1) *Adat shahihah*, yaitu adat yang merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak bertentangan dengan akal sehat, juga tidak bertentangan dengan undang—undang yang berlaku, dan apabila dilaksanakan mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat.
- 2) *Adat fasidah*, yakni adat yang rusak, sebagaimana adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan bertentangan dengan akal sehat dan dengan Undang-undang yang berlaku, seperti adat harus menyembelih manusia ketika terjadi pergantian kepala suku.⁵⁰

Dengan pandangan di atas, berijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan metode *'urf* atau adat, terutama apabila adat yang berlaku secara normative tidak bertentangan dengan syariat yang telah baku, sebagaimana melaksanakan *ashabiah* dalam pembagian harta pusaka, yang sebelumnya merupakan adat masyarakat jahiliyah.

f. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*

Kaidah-kaidah *fiqhiyah kulliyah* sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, perlu memerhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh, kaidah *al- 'adah muhakamah* tidak selalu dapat diterapkan pada pelbagai macam kebiasaan. Ia hanya berlaku dalam adat yang dikategorikan sebagai *al- 'adah al-shohihah*.⁵¹

3. Bidang-bidang Fikih Siyasah

Dari uraian di atas telah tergambar bahwa fikih siyasah adalah bagian dari ilmu fikih. Namun obyek pembahasannya tidak hanya terfokus pada satu aspek atau satu bidang saja. Menurut Imam al-

⁴⁹*Ibid.*, h.190

⁵⁰ Abdul Latif Muda, *Pengantar Fiqh* (Bandung: Pustaka Salam, 1997), h.43

⁵¹H.A. Djazuli., *Op.*, *Cit*, h. 36

Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah idariyyah* (administrasi Negara).⁵² Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi Negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah daiuliyyah/ siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al- Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al- Siyasah al- Sya'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan Negara.⁵³

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tandfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)

⁵² 'Ali bin Muhammad al Mawardi, *al- Ahkam al- Sulthaniyyah wa al Wilayat al- Diniyyah* (Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyyah, 2006), h. 4

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf, *Op., Cit.*, h. 5

h. *Siyasah Harbiyyah Sya'iyah* (Politik Peperangan)⁵⁴

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, Politik Perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkaji tentang penetapan hukum (*tasyr'iyyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadha'iyyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga Negara yang Muslim dengan warga Negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang-piutang yang dilakukan warga Negara Muslim dengan warga Negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak public, pajak, dan perbankan.⁵⁵

B. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematika Ajaran Islam

Dalam ajaran Islam kedudukan fiqh siyasah menempatkan pada pembagian hukum Islam (fiqh) secara sistematis. Dari paparan ini akan dapat diketahui dan urgensi fiqh siyasah dalam sistematika hukum Islam itu.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

1. *Fiqh 'Ibadah* (Hukum Ibadat): hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari Fiqh 'Ibadah adalah shalat, puasa, zakat dan haji.

⁵⁴Muhammad Iqbal, *Op., Cit.*, h. 15

⁵⁵*Ibid.*, h. 16

2. *Fiqh Muamalat* (Hukum Muamalah): hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian dan utang piutang. *Jinayah* (pidana) dan hukum perkawinan (*munakahat*).⁵⁶

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975 M) membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama. *Pertama*, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji; *kedua*, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk; *ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa; *keempat*, yang berkaitan dengan perang-damai dan jihad (*siyar*); *kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di pengadilan (*murafa'ah*); dan *keenam*, yang berkaitan dengan akhlak (*adab*).⁵⁷

Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siyasah.

⁵⁶*Ibid.*, h. 9

⁵⁷Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 10

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam (pemikiran fiqh para ulama klasik) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Di antara problem aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan.

Kalau permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab hanya secara persial dan *ad hoc*, kemungkinan besar hukum Islam akan *out of date* dan tidak reprensif terhadap perkembangan. Karena itu, Negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dapat diterima dan memberi mashlahat untuk masyarakat. Di sinilah peran penting fiqh siyasah.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemashlahatan masyarakat Muslim khususnya, dan warga Negara pada umumnya, pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyasah (atau siyasah syar'iyah) juga dapat menjamin

umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat diibaratkan segala akar sebuah pohon yang menompang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam dan manusia umumnya.⁵⁸

C. Tugas dan Fungsi Pemimpin

Dalam khazanah kepustakaan Islam, Pemimpin dapat diartikan dengan istilah Khalifah atau Imamah. Imamah menurut bahasa berarti “kepemimpinan”. Imam artinya “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya, baik yang memberikan petunjuk ataupun menyetatkan. Imam juga disebut Khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin rakyat. Kata imam juga bisa digunakan untuk Al-Qur’an karena Al-Qur’an itu adalah imam (pedoman) bagi umat Islam. Demikian pula, bisa digunakan untuk Rasulullah saw karena beliau adalah pemimpin para pemimpin, yang sunnahnya diikuti oleh seluruh pemimpin. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemashlahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁵⁹ Persoalan kepemimpinan adalah persoalan sangat penting dan strategis, karena menentukan sebuah keluarga masyarakat dan bangsa.⁶⁰

⁵⁸*Ibid.*, h. 14

⁵⁹Ali As Salus, *Imamah & Khilafah Dalam Tinjauan Syar’i*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 15

⁶⁰Liky Faizal, “Perempuan Dalam Politik: Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, 2016 (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 1. (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/830> (17 Mei 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Dengan demikian, berdasarkan tinjauan bahasa (etimologi), kata imam berarti “pemegang kekuasaan atas umat islam”.⁶¹ Sedangkan secara istilah imamah adalah “kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW.” Senada dengan ini dikemukakan oleh At-Taftazani (w. 772 H) sebagai dikutip oleh Rasyid Ridha (w. 1935) yaitu “imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yakni suatu khilafah yang diwarisi dari Nabi. Demikian pula pendapat Al-Mawardi dalam buku Suyuthi Pulungan: “Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.”⁶²

Pengertian Imamah sinonim pula dengan Khilafah menurut Ibn Khaldun (w. 732 H) adalah “tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemashlahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemashlahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.”⁶³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW mempunyai dua fungsi sekaligus dalam menjalankan dakwahnya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-

⁶¹ Ibid., h. 16

⁶² Ali bin Muhammad al Mawardi., *Op.cit.*, h. 45

⁶³ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*, ter. Masturi Ilham dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 290

peraturan duniawi berdasarkan risalah yang dibawanya. Setelah beliau wafat (w. 632 M), fungsi pertama otomatis berakhir dan tidak dapat dilanjutkan bagi oleh siapa pun, sebab beliau adalah penutup para rasul. Karena orang yang menggantikannya (Abu Bakr) hanya melaksanakan peran yang kedua, maka ia dinamakan dengan *Khalifah (Khalifah Rasul Allah=Pengganti Rasullah)*.⁶⁴

Dalam pandangan Islam, antara fungsi religus dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Sementara dalam praktiknya, para khalifah di dunia Islam mempunyai kapasitas sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik sekaligus. Kenyataan ini kemudian melahirkan pandangan di kalangan pemikir modern bahwa Islam merupakan agama dan Negara sekaligus, sebagaimana antara lain dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa (*al-Islam din wa dawlah*). Barulah ketika kekhalifahan Turki Usmani melemah dan dihancurkan oleh Musthafa Kemal Ataturk (1924), timbul wacana pemisahan antara kekuasaan agama dan politik dalam dunia Islam. Ataturk melepaskan segala yang berbau agama dalam kehidupan Turki modern. Pandangan demikian juga terdapat pada Thaha Husein.⁶⁵

Selain fungsi juga mempunyai tugas-tugas umum yang harus diemban oleh pemimpin atau kepala Negara, tugas-tugas yang harus diemban oleh kepala Negara ada sepuluh hal, yaitu sebagai berikut.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Op.cit.*, h. 150

⁶⁵ *Ibid.*, h. 151

- a. Menjaga agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf umat Islam.
- b. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antarpihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.
- c. Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan berpergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.
- d. Menjalankan hukum had sehingga larangan-larangan Allah tidak ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang binasa.
- e. Menjaga perbatasan Negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan Negara.
- f. Berjihad melawan pihak yang menentang Islam setelah disampaikan dakwah kepadanya sehingga ia masuk Islam atau masuk dalam jaminan Islam atau *dzimmah*.
- g. Menarik *fai-I* dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam secara jelas dalam nash dan ijtihad.
- h. Menentukan gaji dan besarnya ‘atha kepada rakyat dan pihak yang mempunyaibagian dari baitul-maal, tanpa berlebihan atau kekurangan, dan memberikannya pada waktunya, tidak lebih dahulu dari waktunya dan tidak pula menundanya hingga lewat dari waktunya.

- i. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada di bawah wewenangnya.
- j. Agar ia melakukan sendiriinspeksi (pemeriksaan) atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga Negara. Ia tidak boleh menyerahkan tugas ini kepada orang lain karena sibuk menikmati kelezatan atau beribadah, karena orang yang terpercaya dapat saja menjadi penghianat dan orang yang baik dapat saja berubah menjadi penipu.⁶⁶

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT QS: Sad : 26

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا ذَنَبُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

(ق.س:ص: [٣٨]: ٢٦)

Artinya :“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.” (QS: Sad [38]: 26)⁶⁷

⁶⁶ Ali bin Muhammad al Mawardi. Op., Cit., h. 37

⁶⁷ Departemen Agama RI, Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Darus Sunnah, Cet. 6, 2016), h. 455

Allah SWT tidak semata-mata memberikan mandat tanpa wewenang untuk bertindak dan tidak memberikan toleransi baginya untuk mengikuti hawa nafsunya sehingga menyifatnya sebagai sesat. Meskipun ia mempunyai hak atasnya berdasarkan agama dan jabatan kepala Negara, namun ia termasuk bagian dari hak-hak politik seluruh rakyat. Nabi saw bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (روالبخاري)⁶⁸

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar bahwa dia mendengar Rasulullah S.A.W telah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (H.R Bukhari)

Agar kepemimpinan Islam (imamah) tersebut berlaku efektif dalam dunia Islam, maka umat Islam membutuhkan pendirian Negara untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam.⁶⁹ Namun sebelum membicarakan apakah pendirian Negara wajib atau tidak dalam islam dan tujuan pendiriannya, terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian tentang Negara itu sendiri.

Istilah Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: *state* (inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis). Secara terminologi, Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu,

⁶⁸Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, No. 893 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013), h, 5

⁶⁹Muhammad Iqbal, *Op.,cit.*, h. 151

hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu Negara berdaulat: masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Lebih lanjut dari pengertian ini, Negara identik dengan hak dan wewenang⁷⁰.

Secara lebih spesifik, Mac Iver merumuskan bahwa suatu Negara harus memenuhi tiga unsur pokok, yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat dan wilayah tertentu. Tiga unsur ini tentu perlu ditunjang dengan unsur-unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional.⁷¹

Seperti diuraikan di atas bahwa Negara dibutuhkan dalam Islam untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang bahwa Negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Karena merupakan alat, para ulama berbeda pendapat tentang landasan berdirinya Negara dalam Islam. Menurut al-Mawardi, pendirian Negara ini didasarkan pada *ijma'* ulama, adalah fardhu kifayah. Pandangannya didasarkan pada kenyataan sejarah *al-Khulafa' al-Rasyidun* dan khalifah-khalifah setelah mereka.⁷²

Pandangan senada juga al-Ghazali. Menurutnya, agama adalah landasan bagi kehidupan manusia dan kekuasaan politik (Negara) adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan yang erat; politik

⁷⁰ A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[Negara]an (Civic Education)*, Ed. Revisi (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2003), h. 120

⁷¹ Muhammad Iqbal, *Op.,cit.*, h. 151

⁷² *Ibid.*, h. 152

tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa kekuasaan politik dapat hilang dalam kehidupan manusia.

Berbeda dengan dua pemikir Sunni di atas, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa mengatur kehidupan umat memang merupakan bagian kewajiban agama yang terpenting. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa agama tidak dapat hidup tanpa Negara. Ibn Taimiyah menolak *ijma'* sebagai landasan kewajiban mendirikan Negara. Ia melakukan pendekatan sosiologis dalam hal ini. Menurutnya, kesejahteraan dan kemashlahatan manusia tidak akan tercipta kecuali hanya dalam suatu tatanan social di mana setiap orang saling bergantung pada yang lainnya. Oleh sebab itu dibutuhkan pemimpin yang akan mengatur kehidupan social tersebut.

Kelompok Khawarij berpendapat hampir sama dengan Ibn Taimiyah. Pendirian Negara bukanlah didasarkan pada perintah *syar'ul*. Pertimbangan mendirikan Negara adalah kemashlahatan. Kalau menurut kemashlahatan dibutuhkan Negara, maka hal tersebut boleh dilakukan. Tetapi kalau tanpa Negara sudah tercipta kemashlahatan, maka Negara tidak dibutuhkan. Pendapat ini juga dianut oleh Mu'tazilah hanya saja Mu'tazilah menambahkan bahwa akallah yang menetapkan perlu tidaknya membentuk Negara.⁷³

Pemikir modern aktivis al-Ikhwan al-Musliman, 'Abd al-Qadir 'Audah, mengemukakan enam argumen tentang wajibnya mendirikan

⁷³*Ibid.*, h. 153

Negara ini, yaitu: pertama, khilafah atau imamah merupakan *sunnah fi'liyah* Rasulullah SAW sebagaimana pendirian Negara Madinah. Dalam Negara ini beliau menciptakan satu kesatuan politik dan menyatukan umat Islam di bawah kepemimpinannya. Kedua, umat Islam, khususnya para sahabat Nabi, sepakat (*ijma'*) untuk memilih pemimpin Negara setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketiga, sebagian besar kewajiban syariat tergantung pada adanya Negara. Kemashlahatan yang hendak diciptakan oleh Islam tidak akan terwujud tanpa sarananya. Keempat, *nashsh-nashsh* Al-Qur'an dan Hadis Nabi sendiri mengisyaratkan tentang wajibnya mendirikan Negara, seperti dalam surah an-Nisa', 4:59 yang mengingatkan, "Taatiyah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta uli al-amr di antara kamu." Uli al-amr dalam ayat ini adalah pemimpin Negara yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan di kalangan umat Islam. Kelima, sesungguhnya Allah menjadikan umat Islam sebagai satu kesatuan, meskipun berbeda bahasa, suku bangsa, dan warna kulitnya. Keenam, konsekuensi dari kesatuan politik ini adalah bahwa umat Islam harus memilih dan mematuhi satu pemimpin tertinggi.⁷⁴

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa baik secara akal maupun syar'i, Pemimpin dalam suatu wadah tertentu merupakan tolak ukur bagi seluruh umat terutama umat Islam, untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan memperhatikan perkembangan zaman,

⁷⁴*Ibid.*, h.153-154

sehingga tujuan syara' menciptakan kemashlahatan dan menolak kemudaratan dapat tercapai dalam masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan yang dikeluarkan Rektor UIN Raden Intan Lampung yakni Keputusan Rektor tentang Kode Etik yang diberlakukan bagi masyarakat kampus merupakan kebijakan yang sama harus ditaati untuk mengatur, mengawasi dan menciptakan kemashlahatan dilingkungan kampus demi tercapainya tujuan tertentu dalam membentuk mahasiswa yang berakhlakul karimah.

D. Etika dalam Islam

1. Kerangka Dasar Ajaran Islam

Kerangka dasar ajaran Islam dapat dipahami dalam agama Islam yang bersumber dari wahyu (Alquran) dan sunnah (Al-Hadis), ajaran Islam bersumber dari ra'yu (akal pikiran manusia melalui ijtihad).⁷⁵

Dengan mengikuti sistematik Iman, Islam, dan Ihsan yang berasal dari hadis Nabi Muhammad, kerangka dasar agama Islam yang terdiri dari; akidah, syariah dan akhlak. Pada komponen syariah dan akhlak ruang llingkupnya jelas mengenai ibadah, muamalah dan sikap terhadap Khalik (Allah) serta makhluk. Pada komponen akidah, ruang lingkup dihubungkan dengan iman kepada Allah dan para Nabi serta Rasul-Nya.

⁷⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, Ed.6 Cet.11 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 32

Pertama, yang dimaksud dengan akidah secara etimologis adalah ikatan, sangkutan. Dalam pengertian teknis makna akidah adalah iman, keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Karena itu, selain ditautkan dengan rukun iman atau *arkanul iman* yang merupakan asas seluruh ajaran islam.⁷⁶

Dalam sejarah Islam selama empat belas abad, para ulama ahli yang memenuhi syarat yaitu para ulama (orang-orang berilmu) telah berusaha memahami, mendalami, menafsirkan dan membahas akidah Islam dengan ilmu Kalam. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah untuk mempertahankan iman dengan mempergunakan akal pikiran.

Kedua, yang dimaksud dengan syariah, dalam pengertian etimologis adalah jalan yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam). Sedangkan dalam arti teknis, syariah adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan social, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidup-Nya. Norma Ilahi yang mengatur tata hubungan yakni berupa (a) 'Kaidah ibadah' dalam arti khusus atau yang disebut juga kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungna langsung manusia dengan Tuhan, dan (b) 'Kaidah

⁷⁶ Ibid., h. 33

muamalah' yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.⁷⁷

Kemudian *ketiga*, akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab merupakan jama' dari khuluq yang mengandung beberapa arti, di antaranya:

- a. Tabiat, yaitu sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki dan tanpa diupayakan.
- b. Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, yakni berdasarkan keinginannya.
- c. Watak, cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang diupayakan hingga menjadi adat atau sikap, perangai, tingkah laku dan budi pekerti manusia terhadap pencipta alam semesta.⁷⁸

Maksud di atas terkandung juga dalam kata-kata Aisyah yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah Saw yang artinya “*Akhlaknya (Rasulullah) adalah Al-Qur'an.*”⁷⁹ Akhlak Rasulullah yang dimaksudkan ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah Saw yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Qur'an. Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Swt. Sebagai orang mukmin sangat wajib untuk meniru budi pekerti dan keluhuran akhlaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 21,

⁷⁷ Ibid., h. 34

⁷⁸ Iman Abdul Mukmin Sa'aduddin, *Meneladani Akhlak Nabi: Membangun Kepribadian Muslim* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006), h. 15

⁷⁹ Jalaludin Rahmat, *Op., Cit.*, h. 44

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾ (ق.س: الاحزاب: [٣٣]: ٢١)

Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.” (QS: Al-Ahzab [33]: 21)⁸⁰

Dan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا (رواه ترمذي)

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A ia berkata Rasulullah S.A.W Bersabda: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR. Tirmidzi)⁸¹

Sedangkan definisi akhlak secara terminologis, menurut pendapat Ibnu Shadaruddin Asy Syarwan, Akhlak adalah (ilmu) tentang perbuatan-perbuatan mulia serta cara memiliki perbuatan tersebut agar menghiasi diri, dan (ilmu) tentang perbuatan-perbuatan buruk serta cara menjauhinya agar diri bersih dari perbuatan buruk.⁸²

Ibnu Maskawaih dalam kitabnya, Tahdzib Al Akhlaq menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu keadaan dalam diri yang mengajaknya kepada berbagai tindakan tanpa perlu berpikir dan mempertimbangkan.

⁸⁰Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, Cet. 6, 2016), h. 421

⁸¹Musthafa Dib al-Bugha, *Al-Wafi diterjemahkan dari Al-Wafi fi Syarh Al-Arbain An-Nawawiyah* (Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2007), h. 189

⁸²Ibid., h. 17

Kemudian Al Ghazali dalam *Al Ihya* mengatakan tentang arti akhlak yang baik, *khuluq* dan *khalqu* merupakan dua kata yang pemakaiannya sama. Jadi yang dimaksud dengan *khalqu* adalah gambaran lahiriahnya, sedang yang dimaksud dengan *khuluq* adalah gambaran batiniahnya.

Berdasarkan definisi maka akhlak menurut Al Ghazali mencakup empat hal; *pertama*, kekuatan pengetahuan. *Kedua*, kekuatan emosi. *Ketiga*, kekuatan keinginan atau nafsu. Dan *keempat*, kekuatan keadilan.

Dari hasil pemikiran Al-Ghazali tentang definisi akhlak apabila dikaitkan dengan studi dapat diketahui dengan jelas, bahwa tujuan akhir yang akan dicapai melalui kegiatan pendidikan ada dua, yaitu:⁸³

- a. Tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah.
- b. Kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Karena itulah sejalan dengan filsafat Al-Ghazali yang bercorak tasawuf, maka sasaran pendidikan, menurut Al-Ghazali, dalam kesempurnaan merupakan tujuan akhir dan maksud pendidikan itu insani dunia dan di akhirat. Tujuan ini tanpak bernuansa religious dan moral, tanpa mengabaikan masalah duniawi. Dan manusia akan

⁸³ Akhmal Hawi, *Filsafat Pendidikan Islam Prespektif Pemikiran Pendidikan Al-Ghazali*, dalam jurnal *TASAMUH*, VOL. 1, NO. 1, 1 Juni 2015 (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung), h.33

sampai kepada tingkat kesempurnaan hanya dengan menguasai sifat keutamaan melalui jalan ilmu. Keutamaan itu ialah yang akan membuat bahagia di dunia dan mendekatkan kepada Allah SWT.⁸⁴

Dari berbagai penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak, yaitu ilmu yang membahas tentang perbuatan mulia serta tata cara mengupayakan perbuatan dan tentang perbuatan buruk serta menjauhinya. Atau ilmu yang menunjukkan batasan guna mengukur tindakan-tindakan yang baik dan buruk disertai balasan pelaku yang bertanggung jawab.⁸⁵

2. Etika, Moral, dan Susila

a. Etika

Pengertian etika dari segi etimologi (ilmu asal-usul kata), etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti watak kesusialaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), etika diartikan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan hak kewajiban moral (akhlak).⁸⁶ Dari pengertian kebahasaan, etika ialah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan

⁸⁴ Ibid., h.34

⁸⁵ Ibid., h. 18-19

⁸⁶ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, Ed. Revisi Cet. 13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 75

yang dilakukannya dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.⁸⁷

Adapun arti etika dari segi istilah yang telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Menurut Soegarda Poerbakawatja mengartikan etika sebagai filsafat nilai, kesusilaan tentang baik-buruk, serta berusaha mempelajari nilai-nilai dan merupakan juga pengetahuan tentang nilai-nilai.

Sedangkan pengertian etika menurut Ki Hajar Dewantara adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia, mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan.⁸⁸

Dari beberapa definisi etika di atas dapat diketahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut. *Pertama*, dilihat dari segi objek pembahasannya, mengenai perbuatan yang dilakukan manusia. *Kedua*, dilihat dari segi sumbernya, mengenai akal pikiran dan filsafat. *Ketiga*, dilihat dari segi fungsinya, mengenai etika sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. *Keempat*, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relative yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan ketentuan zaman.⁸⁹

b. Moral

⁸⁷ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, cet. Ke-3 (Jakarta: PT Tri Handayani Utama, 1983),

⁸⁸ Abuddin Nata, *Ibid.*, h. 76

⁸⁹ *Ibid.*, h. 77

Pengertian moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, *mores* yaitu jamak dari kata *mos* yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik-buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.

Sedangkan moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salh, baik, atau buruk.

Selanjutnya pengertian moral dalam buku *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Dalam buku ini mengemukakan pengertian moral sebagai berikut.

- 1) Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk;
- 2) Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah;
- 3) Ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik;⁹⁰

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah.

Namun demikian, dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio,

⁹⁰*Ibid.*, 77-78

sedangkan dalam pembicaraan moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat.

c. Susila

Pengertian susila atau kesusilaan berasal dari kata susila yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *su* dan *sila*. *Su* berarti baik, bagus. Sedangkan *sila* berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma.⁹¹

Kata susila selanjutnya digunakan untuk arti sebagai aturan hidup yang lebih baik. Orang yang susila adalah orang yang berkelakuan baik, sedangkan orang yang a susila adalah orang yang berkelakuan buruk. Misalnya para pelaku zina (pelacur) yang sering diberi gelar sebagai tuna susila.

Dengan demikian kata susila dapat pula berarti sopan, beradab, baik budi bahasanya. Dan kesusilaan sama dengan kesopanan yang lebih mengacu kepada upaya membimbing, memandu, mengarahkan, membiasakan dan memasyarakatkan hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

3. Pembentukan Perilaku

Perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan praktek. Perilaku manusia dapat dilihat dari 3

⁹¹*Ibid.*, 80-81

(tiga) aspek yaitu: aspek fisik, aspek psikis dan aspek sosial. Secara terinci merupakan bagian refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti: pengetahuan, motivasi, persepsi, sikap dan sebagainya yang ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor pengalaman, keyakinan, sarana fisik dan sosial budaya masyarakat.⁹²

Tingkatan dalam perilaku yaitu :

a. Persepsi (*Perception*)

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil adalah merupakan perilaku tingkat pertama.

b. Respon Terpimpin (*Guided Respon*)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh adalah merupakan indikator perilaku tingkat dua.

d. Mekanisme (*Mecanism*)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan maka ia sudah mencapai perilaku tingkat tiga.

e. Adaptasi (*Adaptation*)

Adaptasi adalah suatu perilaku atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan itu sudah

⁹² Soekidjo Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 130

dimodifikasikan sendiri tanpa mengurangi kebenarannya tindakannya tersebut.⁹³

Pengukuran perilaku dapat dilakukan secara tidak langsung, yakni dengan wawancara terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan beberapa jam, hari, atau bulan yang lalu (recall). Pengukuran juga dapat dilakukan secara langsung, yakni dengan menabsorbsi tindakan atau kegiatan responden. Menurut Gibson (1987), bertahun tahun membangun teori dan penelitian, disepakati bahwa : (1) perilaku adalah akibat, (2) perilaku diarahkan oleh tujuan, (3) perilaku yang bisa diamati dapat diukur, (4) perilaku yang tidak dapat secara langsung diamati (misalnya berpikir dan mengawasi) juga penting dalam mencapai tujuan, (5) perilaku dimotivasi atau didorong.

Teori Lawrance Green (1991) dalam Notoatmojo (2003) menyebutkan ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku individu maupun kelompok, yaitu :

- a. Faktor Penentu (*predisposing factors*), yaitu meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan persepsi seseorang yang menjadi dasar motivasi individu atau kelompok untuk bertindak. Misalnya kesadaran seseorang dalam bersikap yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak.
- b. Faktor pendukung (*enabling factors*), meliputi keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk menunjang perilaku. Misalnya

⁹³ *Ibid.*, h. 132

di adakan kegiatan pembinaan mental spiritual untuk meningkatkan iman terutama dalam berperilaku.

- c. Faktor pendorong (*reinforcing factors*), yaitu faktor yang memperkuat perubahan perilaku seseorang yang dikarenakan adanya sikap dan perilaku yang lain. Misalnya meningkatkan kesepahaman dalam pengawasan terkait peraturan-peraturan yang akan ditegakan.⁹⁴

Menurut Bloom (1978) dalam Notoatmodjo (2003) disebutkan bahwa, perilaku seseorang terdiri dari 3 (tiga) bagian penting yaitu : 1) kognitif, 2) afektif dan 3) psikomotor. Kognitif dapat diukur dari pengetahuan, afektif diukur dari sikap atau tanggapan dan psikomotori diukur melalui praktek yang dilakukan. Dalam proses pembentukan dan perubahan perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam dan luar individu. Faktor dari dalam individu mencakup pengetahuan, kecerdasan, persepsi, sikap, emosi, dan motivasi yang berfungsi untuk mengolah rangsangan dari luar. Faktor dari luar individu meliputi lingkungan sekitar baik fisik maupun non fisik seperti iklim, interaksi manusia, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.⁹⁵

⁹⁴ Soekidjo Notoatmodjo, *Ibid.*, h. 139- 140

⁹⁵ *Ibid.*, h. 141

4. Macam-macam Akhlak

a. Akhlak Mahmudah

Secara etimologi akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Mahmudah merupakan bentuk *maf'ul* dari kata *hamida* yang berarti dipuji. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji disebut pula dengan *akhlakul-karimah* (akhlak mulia), atau *al-akhlaq al-munjiyat* (akhlak yang menyelamatkan pelakunya).⁹⁶ Jadi akhlak mahmudah berarti tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah.⁹⁷

Adapun pengertian akhlak mahmudah secara terminologi, para ulama berpendapat.

- 1) Menurut Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Samsul Munir, akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah, sehingga mempelajarinya dan mengamalkannya merupakan kewajiban individual setiap muslim.
- 2) Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Samsul Munir, pangkal akhlak terpuji adalah ketundukan dan keinginan yang tinggi. Sifat-sifat terpuji, menurutnya berpangkal dari kedua hal tersebut. Ia memberikan gambaran tentang bumi yang tunduk pada ketentuan Allah. Demikian pula manusia, tatkala diliputi

⁹⁶Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h.180

⁹⁷Hamzah Tualeka, et. all., *Akhlak Tasawuf* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011),

rasa ketundukan kepada Allah, kemudia turun taufik dari Allah, ia akan meresponnya dengan sifat-sifat terpuji.

Jadi, yang dimaksud dengan akhlak mahmudah adalah perilaku manusia yang baik dan disenangi menurut individu maupun social, serta sesuai dengan ajaran yang bersumber dari Tuhan. Akhlak mahmudah dilahirkan dari sifat-sifat mahmudah yang terpendam dalam jiwa manusia. Oleh karena itu, sikap dan tingkah laku yang lahir, adalah cermin dari sifat atau kelakuan batin seseorang.⁹⁸ Akhlak yang terpuji senantiasa berada dalam control ilahiyah yang dapat membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemashlahatan umat, seperti sabar, jujur, ikhlas, bersyukur, tawadhu (rendah hati), husnudzon (berprasangka baik), optimis, suka menolong orang lain, suka bekerja keras, akhlak dalam berpakaian dan lain-lain.⁹⁹

Dalam pembahasan ini penulis akan menjabarkan akhlak mahmudah yang meliputi etika dalam berpakaian, Iffah, dan malu.

1) Etika dalam berpakaian

Pakaian yang dipakai seseorang hendaknya menutup aurat, baik laki-laki maupun wanita.¹⁰⁰ Adapun untuk wanita maka semua tubuhnya adalah aurat. Allah SWT berfirman:

⁹⁸Samsul Munir Amin, *Op, Cit.*, h.180-181

⁹⁹Aminuddin dkk, Pendidikan Agama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), h. 153

¹⁰⁰ 'Abdul azizbin Fathhi as-Sayyid, *Ensiklopedi Adab Islam menurut al-Quran dan as-Sunnah* (Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007), h. 342

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ (ق. س: الاحزاب: [٣٣]: ٥٩)

Artinya: “Wahai, Nabi! katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya keseluruhan tubuh mereka.”(QS. Al-Ahzab [33] : 59)¹⁰¹

Ada beberapa kriteria pakaian yang harus diperhatikan dalam menutup aurat. Pertama, tidak tipis. Kedua, lebar dan tidak sempit. Ketiga, panjang dan mampu menutup seluruh aurat. Sebab, pakaian yang terlalu sempit akan membentuk tubuh dan lekak-lekuk aurat. Maka dari itu, pakaian seperti ini tidak termasuk kriteria menutup aurat. Demikian juga pakaian tipis, ia tidak memenuhi syarat dalam menutup aurat apalagi yang ukurannya pendek hingga aurat terlihat.¹⁰²

2) Iffah

Secara etimologis, ‘iffah adalah bentuk masdar dari *affa-ya’ifgu’iffah* yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dan juga berarti kesucian tubuh.

Secara terminologis, iffah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. Nilai dan wibawa seseorang tidaklah

¹⁰¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, Cet. 6, 2016), h. 427

¹⁰² *Ibid.*, h. 343

ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya, dan tidak pula ditentukan oleh bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya. Oleh sebab itu, untuk menjaga kehormatan diri tersebut, setiap orang haruslah menjauhkan diri dari segala perbuatan dan perkataan yang dilarang oleh Allah SWT.

Al-Qur'an dan Hadis memberikan beberapa contoh dari iffah, salah satunya ialah untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah seksual, seorang Muslim dan Muslimah diperintahkan untuk menjaga penglihatan, pergaulan dan pakaiannya.¹⁰³

3) Malu

Malu (*al-harya'*) adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Orang yang memiliki rasa malu, apabila melakukan sesuatu yang tidak patut, rendah atau tidak baik dia akan terlihat gugup, atau mukanya merah. Sebaliknya orang yang tidak punya rasa malu, akan melakukannya dengan tenang tanpa ada rasa gugup sedikitpun.

Sifat malu dapat dibagi kepada tiga jenis. Pertama, malu kepada Allah SWT; kedua, malu kepada diri sendiri; dan yang ketiga, malu kepada orang lain. Seseorang akan malu kepada

¹⁰³ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, cet. II (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI)), 2000, h.103

Allah apabila tidak mengerjakan perintah-Nya, tidak menjauhi larangan-Nya, serta tidak mengikuti petunjuk-Nya.¹⁰⁴

b. Akhlak Mazmumah

Akhlak tercela atau Akhlak Mazmumah adalah segala tingkah laku manusia yang dapat membawa kepada kebinasaan dan kehancuran diri, yang bertentangan dengan fitrahnya yang menuju kebaikan.¹⁰⁵ Hal yang membuat manusia untuk berbuat tercela (maksiat) diantaranya:

- 1) Dunia dan isinya , yaitu berbagai hal yang bersifat material (harta, kedudukan) yang ingin dimiliki manusia sebagai kebutuhan dalam melangsungkan hidupnya agar bahagia.
- 2) Manusia, selain mendatangkan kebaikan, manusia dapat mengakibatkan keburukan, seperti istri, anak, karena kecintaan kepada mereka misalnya, sampai bisa melalaikan manusia dari kewajibannya kepada Allah SWT dan terhadap sesama.
- 3) Setan (iblis). Setan adalah manusia yang paling nyata, ia menggoda manusia melalui batinnya untuk berbuat jahat dan menjauhi Tuhan.

¹⁰⁴ *Ibid.*, h. 128-129

¹⁰⁵ Muh. Asroruddin Al Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 39

- 4) Nafsu. Nafsu adakalanya baik (*muthmainnah*), dan adakalanya buruk (*amarah*), akan tetapi nafsu cenderung mengarah kepada keburukan.¹⁰⁶

Pada dasarnya sifat dan perbuatan tercela dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1) Maksiat lahir

Maksiat berasal dari bahasa Arab, yaitu *ma'siyah* yang artinya pelanggaran oleh orang yang berakal baligh (*mukallaf*), karena melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh syari'at Islam, dan pelanggaran tersebut dilakukan dengan meninggalkan alat-alat lahiriyah.¹⁰⁷ Maksiat lahir dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a) Maksiat lisan, seperti berkata-kata yang tidak bermanfaat, berlebih-lebihan dalam percakapan, berbicara hal yang batil, berkata kotor, mencacimaki atau mengucapkan kata laknat, baik kepada manusia maupun binatang, menghina, menertawakan, merendahkan orang lain, berdusta, dan lain-lain.
- b) Maksiat telinga, seperti mendengarkan pembicaraan orang lain, mendengarkan orang yang sedang mengumpat, mendengarkan orang yang sedang adu domba,

¹⁰⁶ *Ibid.*, h. 40

¹⁰⁷ Mahjuddin, *Kuliah Akhlak Tasawuf* (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), h. 15

mendengarkan nyanyi-nyanyian atau bunyi-bunyian yang dapat melalaikan ibadah kepada Allah.

- c) Maksiat mata, seperti melihat aurat wanita yang bukan mahramnya, melihat aurat laki-laki yang bukan mahramnya, melihat orang lain dengan gaya menghina, melihat kemungkaran tanpa beramar ma'ruf nahi munkar.
- d) Maksiat tangan, seperti mencuri, merampok, mencopet, merampas, mengurangi timbangan dan lain-lain.¹⁰⁸

2) Maksiat batin

Maksiat batin berasal dari dalam hati manusia atau digerakkan oleh tabiat hati. Sedangkan hati memiliki sifat yang tidak tetap, berbolak-balik, berubah-ubah, sesuai dengan keadaan atau sesuatu yang mempengaruhinya. Hati terkadang baik, simpati dan kasih sayang, tetapi di sisi lainnya hati terkadang jahat, pendendam dan sebagainya.¹⁰⁹

Maksiat batin ini lebih berbahaya dibandingkan dengan maksiat lahir, karena tidak terlihat dan lebih sukar untuk dihilangkan. Beberapa contoh penyakit batin (akhlak tercela) yaitu; Takabbur, Syirik, Nifaq, iri hati dan dengki dan marah¹¹⁰

¹⁰⁸*Ibid.*, h. 12

¹⁰⁹*Ibid.*, 13

¹¹⁰Mahjuddin, *Kuliah Akhlak Tasawuf*, h. 26

BAB III

GAMBARAN UMUM UIN RADEN INTAN LAMPUNG

A. Sejarah UIN Raden Intan Lampung

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tertua dan terbesar di Lampung. Dalam lintas perjalanan sejarahnya, pada April tahun 2017 UIN Raden Intan merupakan hasil transformasi dari IAIN Raden Intan Lampung yang berkembang dalam beberapa fase, yaitu: fase rintisan dan pendirian, fase pembangunan, fase pengembangan, dan fase alih status.

1. Fase Rintisan dan Pendirian (1961-1973)

Pada mulanya, UIN Raden Intan Lampung ketika bernama IAIN Raden Intan Lampung merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL). Yayasan ini diketuai oleh Raden Muhammad Sayyid berdiri pada 1961 sebagai yayasan sosial. Yayasan ini bertujuan membangun rumah-rumah peribadatan umat Islam dan pendidikan Islam di wilayah Lampung.

Pada 1963, YKIL mengadakan Musyawarah Alim Ulama se-Lampung bertempat di Kota Metro Lampung Tengah dengan agenda menghimpun potensi alim ulama dan mengintegrasikan antara tokoh-tokoh masyarakat dengan aparat pemerintah. Hasil musyawarah antara lain merekomendasikan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam

dengan 2 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah. Aktivitas akademik dan administrasi lembaga ini pada awalnya dipusatkan di Sekretariat Fakultas Hukum UNSRI Cabang Palembang di Lampung (Unila sekarang). Kegiatan perkuliahan dan perkantoran dua Fakultas tersebut bersebelahan dengan Fakultas Hukum UNSRI (Unila) diantaranya di Aula di jalan Hasanuddin No.1 Teluk Betung. Setelah berjalan beberapa bulan, kegiatan perkuliahan dipindahkan dari Fakultas Hukum UNSRI (Unila) ke masjid Jami' Lungsir Teluk Betung yang sekarang bernama Masjid Al-Furqan. Berlangsung satu tahun.

Setahun kemudian (1964), seiring dengan berdirinya Lampung sebagai provinsi yang terpisah dari Sumatera Selatan, Fakultas Tarbiyah dinegerikan sebagai cabang Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang di bawah kepemimpinan Syaikh Syamsuddin Abdul Mu'thi. Selanjutnya, muncul gagasan untuk membangun PTAIN di Provinsi Lampung, dengan mendirikan Fakultas Ushuludin pada tahun 1965 dengan Dekan KH. Zakariya Nawawi.

Pada tahun 1966, aktivitas akademik ketiga fakultas yang ada dipindahkan ke Kampus Kaliawi. Pada tahun yang sama dalam rangka penegerian, dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Islam (Yaperti) Lampung dengan ketua K.H. Zakaria Nawawi.

Yaperti bekerja keras membenahi proses administrasi dan menyiapkan proposal penegerian yayasan yang disetujui Menteri

Agama dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI No. 162 Tahun 1967 tentang pengesahan susunan personalia kepanitiaan penegerian dengan struktur organisasi yang diketuai oleh Gubernur Drs. Zainal Abidin Pagar Alam. Sekretaris panitia adalah Mochtar Hasan, SH yang pada waktu itu menjabat sekretaris daerah Propinsi Lampung, sementara Bendahara dijabat oleh K.H. Zakaria Nawawi sebagai wakil Yaperti. Adapun anggota-anggotanya terdiri dari para dekan fakultas yang ada, tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama yang terdiri dari tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan PSII.

Jerih payah dan usaha YKIL, Yaperti, dan panitia gabungan ini akhirnya menghasilkan SK Menteri Agama Nomor 187 Tahun 1968 tanggal 26 Oktober 1968 tentang Pendirian “IAIN Al-Jami’ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyyah Raden Intan”. Pemberian nama “Raden Intan” didasari pada pertimbangan bahwa di belakang nama Universitas/Institut biasanya diberi label nama kota atau nama pahlawan; dan Raden Intan merupakan pejuang bangsa yang menentang penjajahan Belanda, sekaligus penyiar agama Islam di Lampung.

Pada periode pertama, kepemimpinan institut (Rektor) dijabat oleh Mochtar Hasan S.H., dibantu M. Djuaini Zubair, SH, sebagai Sekretaris Al-Jami’ah (Kepala Biro). Tiga tahun kemudian, jabatan rektor dipegang oleh Drs. Ibrahim Bandung (1971-1973).

2. Fase Pembangunan (1973-1993)

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Rektor ke-2, Institut mulai memasuki fase pembangunan di bawah masa kepemimpinan Rektor ke-3, Letkol. Drs. H. Soewarno Achmady (1973-1978). Fase ini ditandai dengan pemberian hibah tanah seluas 5 hektar di Labuhan Ratu oleh Pemda Dati I Lampung yang kemudian dibangun kampus baru untuk kegiatan administrasi dan akademik. Setelah proses pembangunan gedung dan sarana prasarana rampung, aktivitas Institut pun dipindahkan dari Kampus Kaliawi ke Kampus Labuhan Ratu. Hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Rektor ke-4, Bapak Drs. Muhammad Zein (1978-1984). Pada masanya juga, Institut mendapat hibah tanah seluas 50 hektar di Sukarame dari Pemda atas dukungan Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara (putra Lampung).

Di kawasan yang baru ini didirikan 4 unit gedung perkuliahan berantai dua yang dipersiapkan untuk kegiatan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Drs. H. Busyairi Madjidi sebagai rektor ke-5 (1984 – 1989). Setelah bangunan-bangunan dan fasilitas penunjang dipandang memadai, maka pada tanggal 20 Agustus 1987 kegiatan perkuliahan untuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin secara resmi dipindahkan ke kompleks Kampus Sukarame, sedangkan untuk Fakultas Syari'ah, termasuk Rektorat, kegiatannya masih berlangsung di Kampus Labuhan Ratu.

Pada masa rektor ke-6 yang dijabat Drs. H. Pranoto Tahrir Fatoni (1989-1993), pembangunan fisik terus digalakkan, antara lain dengan membangun gedung Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan. Di samping itu, ia juga melakukan upaya-upaya penataan administrasi umum, terutama administrasi keuangan, serta bidang akademik dan kemahasiswaan.

3. Fase Pengembangan (1993-2015)

Gelombang pengembangan Institut mulai dilakukan secara intensif pada masa kepemimpinan rektor ketujuh Drs. H.M Ghazi Badrie (1993-1997), ditandai dengan peresmian Fakultas Dakwah yang telah dirintis sejak tahun 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 397 tahun 1993, sehingga jumlah Fakultas yang ada di lingkungan Institut menjadi empat sebagaimana sekarang ini.

Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA. (1998-2002) yang menjabat rektor ke-8 melanjutkan upaya pengembangan akademik ini antara lain dimulai dengan pemindahan seluruh kegiatan Rektorat yang semula berpusat di Kampus Labuhan ke Kampus Sukarame, sekaligus menandai perpindahan secara resmi kegiatan akademik Institut ke Kampus Sukarame. Ia juga mengupayakan pembukaan Program S-2 dan Fakultas Adab. Namun sayang, karena peminat bidang studi untuk Fakultas Adab sangat minim, maka kegiatan Fakultas ini dihentikan. Adapun program S2 terus survive diawali dengan pembahasan dalam sidang senat IAIN (sekarang UIN) Raden Intan tanggal 17 Nopember

1999, yang menyetujui untuk membuka Program Pascasarjana (S2) dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Rektor nomor 222 tahun 1999 tanggal 4 Desember 1999 tentang persiapan pendirian Program Pascasarjana (S2) IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Surat Keputusan Rektor tersebut dikukuhkan oleh Gubernur Lampung, Ketua DPRD, Rektor UNILA dan Ormas Islam Provinsi Lampung sebagai dukungan untuk berdirinya Program Pascasarjana IAIN Raden Intan. Pada tahun 2001 Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Raden Intan mulai beroperasi dengan jumlah mahasiswa awal sebanyak 52 orang. Setahun kemudian, PPs berhasil mendapat izin operasional berdasarkan SK. Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2002, tepatnya pada masa kepemimpinan Rektor ke-9, Prof. Dr. H.S. Noor Chozin Sufri (2002-2006). Pada masa ini dirintisnya pesantren mahasiswa (ma'had 'aly) dan dibangunnya beberapa gedung baru yaitu kantor Pascasarjana, gedung perpustakaan lantai tiga, ruang dosen Fakultas Tarbiyah dan ruang dosen Fakultas Syari'ah. Pada masa ini juga dilakukan penguatan sarana dan prasarana, serta pengembangan program studi baru.

Pengembangan dilanjutkan oleh rektor ke-10, Prof. DR. KH. Musa Sueb, MA. (2006-2010) dengan kebijakan peningkatan mutu akademik mahasiswa dan dosen, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengembangan akademik bahasa asing, dan pembinaan Pesantren Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah di lingkungan kampus. Pengembangan

prodi-prodi baru pada program S1 dan S2 juga dilakukan, di antaranya: Prodi Tadris Matematika, Prodi Tadris Bahasa Inggris, Prodi Tadris Biologi, Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), pada Fakultas Tarbiyah, Prodi Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah, Prodi Pemikiran dan Politik Islam pada Fakultas Ushuluddin, dan Prodi Perdata Syari'ah pada Program Pascasarjana (PPs). Musa juga mendorong pemberdayaan unit-unit pelaksana teknis dan lembaga penunjang akademik antara lain Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), Lembaga Penelitian (LEMLIT), Pusat Pembinaan Bahasa (PUSBINSA) dan Pusat Penjamin Mutu Pendidikan (P2MP), di samping pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga. Pada akhir masa jabatannya, Institut ditetapkan sebagai salah satu instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) secara penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 277/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010.

Laju pengembangan kampus ke arah kemajuan terus digalakkan oleh rektor ke-11 yang dijabat Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2010-sekarang) dengan motto: Semakin Unggul dan Kompetitif. Berbagai usaha pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM terus digalakkan, baik secara fisik maupun akademik. Sejumlah gedung administrasi dan sarana akademik direnovasi dan dibangun untuk memberikan layanan prima bagi mahasiswa. Fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran pun terus dibenahi dan dibangun, antara lain:

hotspot, laboratorium, hingga lapangan olahraga. Di bawah kepemimpinannya, sejumlah prestasi mulai diukir pada level nasional. Tahun 2011, IAIN (sekarang UIN) Raden Intan Lampung menduduki peringkat pertama se-wilayah Sumatera dan ketiga nasional untuk SPMB-PTAIN 2011. Tahun yang sama, masuk peringkat sepuluh besar PTAIN dari segi penyerapan anggaran.

Terhitung November 2011, IAIN (sekarang UIN) Raden Intan memiliki jurnal ilmiah terakreditasi nasional, yaitu ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Jurnal Al-‘Adalah, dan Jurnal Kalam. Dan awal tahun 2012, Program Pascasarjana membuka Program Doktor dengan Konsentrasi Hukum Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Dan masih banyak lagi kemajuan yang dicapai dan terus diupayakan menuju visi sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul dan kompetitif.

Selanjutnya melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1457 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 diberikan tambahan 4 izin penyelenggaraan program magister (S2) yaitu: Ekonomi Syari’ah, Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Filsafat Agama, dan Manajemen Pendidikan Islam. Hingga saat ini tahun 2017 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung menyelenggarakan 8 program studi Magister (S2) dan 3 program Studi Doktor (S3).

4. Fase Alih Status (2015-2017)

Sejak tahun 2014, tepatnya bulan Mei 2014 telah selesai penyusunan proposal transformasi IAIN Raden Intan Lampung menjadi UIN Raden Intan Lampung. Pada tahun 2015 Menteri Agama, melakukan studi kelayakan dengan hadirnya Direktur Jenderal Pendidikan Islam ke kampus UIN Raden Intan Lampung. Melalui perjuangan sungguh-sungguh di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor, akhirnya pada tahun 2016 mendapatkan persetujuan/izin prinsip dari Presiden Republik Indonesia bahwa IAIN Raden Intan Lampung menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan motto *Intellectuality, Spirituality*, dan *Integrity*.

Tahun 2017 menjadi awal perubahan arah pengembangan pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2017 tanggal 7 April 2017, yang juga mempengaruhi arah pengembangan UIN Raden Intan Lampung. Pada bulan April 2017, Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diundangkan, sehingga sejak 2017 diresmikan menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang disingkat UIN RIL LAMPUNG dengan pengembangan beberapa fakultas dan program studi bidang sains dan teknologi.¹¹¹

¹¹¹<https://www.radenintan.ac.id/sejarah-singkat/> diakses pada tanggal 25 Maret 2019 pada jam 19.00 WIB

B. Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa

Di dalam Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa bahwa telah ditetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak mahasiswa. Sebagaimana harus ditaati oleh mahasiswa sesuai dengan tujuan Kode Etik Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dalam Pasal 3 yang berbunyi:

1. terciptanya suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pembelajaran di UIN Raden Intan Lampung.
2. terbentuknya sarjana yang berakhlakul karimah.

Dalam Bab IV Larangan Pasal 7, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dilarang:

- a. Memakai kaos oblong/tidak berkerah celana/baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang, anting, kalung, gelang (khusus laki-laki), dan tato, pakaian ketat dan transparan, rok/celana diatas mata kaki, baju pendek (khusus perempuan), tanpa jilbab dan memfungsikan sepatu jadi sandal.¹¹²

Dari penjabaran larangan mahasiswa diatas, dalam Bab V Pelanggaran Pasal 8 merupakan masih dalam pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran tata tertib yang berlaku dan menimbulkan kerugian

¹¹²Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015, h. 68

moral bagi UIN serta masih dapat dibina oleh pimpinan UIN Raden Intan Lampung.¹¹³

Kemudian, dalam Bab VI Sanksi-sanksi dijelaskan Jenis Sanksi Pasal 13 yaitu:

- a. Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat;
- b. Pelanggaran tingkat ringan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diproses secara hukum (telah dijatuhi sanksi) menjadi pelanggaran tingkat sedang, dan pelanggaran tingkat sedang yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diproses secara hukum (telah dijatuhi sanksi) menjadi pelanggaran tingkat berat;

Sanksi Ringan Pasal 14 yang meliputi:

- a. Nasihat dan teguran, baik secara lisan maupun tertulis;
- b. Sanksi materiil berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang;
- c. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.
- d. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan.¹¹⁴

¹¹³ Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015, h. 71

¹¹⁴ Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2015, h. 73

C. Pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa

Pelaksanaan kode etik mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung khususnya di Fakultas Syariah tidak berjalan maksimal pasalnya masih terlihat sejumlah pelanggaran yang dilakukan mahasiswa. Misalnya mahasiswa memakaikaos oblong/tidak berkerah, celana/baju yang sobek, sandal, topi, rambut panjang, gelang (khusus laki-laki), dan pakaian ketat dan transparan, rok/celana diatas mata kaki, baju pendek (khusus perempuan). Kode etik merupakan seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, penampilan, dan berpakaian mahasiswa selama menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

Kode etik secara keseluruhan belum dapat merubah perilaku sosial budaya mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang tercantum dalam kewajiban umum dan kewajiban khusus kode etik mahasiswa. Agar seseorang dapat menjalankan kehidupan social budayanya yang baik tanpa melakukan pelanggaran, tentunya ada aturan yang mengatur apakah itu berupa adat istiadat, hukum dan aturan. Aturan yang dimaksudkan pada kode etik mahasiswa yang mengatur mahasiswa Fakultas Syariah untuk melakukan kehidupan sosial sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung secara tertib baik dilingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus (di masyarakat).

Dari hasil wawancara dengan pimpinan fakultas syariah, pada perumusan surat keputusan Rektor nomor 260 tentang kode etik

mahasiswa, kode etik dirumuskan pada tingkat institut masing-masing melibatkan pimpinan atau dekan fakultas. Sejak diterbitkan surat keputusan Rektor nomor 260 tentang kode etik mahasiswa sudah dievaluasi dua kali dari masa transformasi IAIN menjadi UIN. Selanjutnya upaya sosialisasi di kalangan mahasiswa sudah dilakukan setiap ajaran baru diperkenalkan pada saat kulta (kuliah taaruf), sosialisasi oleh dosen-dosen, dibuat spanduk atau banner di sekitar lingkungan fakultas, dan evaluasi terbaru ialah sosialisasi peraturan kode etik dilampirkan pada absensi sehingga mengingatkan para dosen untuk tetap memperingati mahasiswa di kelas. Melihat upaya yang sudah dilakukan pihak fakultas harusnya sudah paham adanya peraturan kode etik meskipun dalam pengamatan tidak semua memahami. Seperti diketahui pasti ada mahasiswa yang tidak mengindahkan atau melanggar kode etik. Misalnya mahasiswa merokok di lingkungan kampus, buang sampah sembarangan, dan segi berpakaian sebagian memenuhi kode etik. Kalau pelanggaran berat dulu pernah terjadi sekitar tahun 2015, berantem, melakukan kerusakan kampus, dan menjadi urusan hukum atau kepolisian, pencurian, jual narkoba, sudah di *Drop Out* (DO) atau mahasiswa diberhentikan dari kampus. Atas pelanggaran ringan, hanya ditegur. Jika dilakukan berulang-ulang dipanggil dan diberi sanksi, nanti pihak jurusan yang akan memberi sanksi misalnya buat pernyataan, perjanjian, diberi tugas karya ilmiah, atau Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) disita. Dalam pelaksanaan kode etik ada kendalanya. Pertama, masih ada sebagian mahasiswa yang belum

paham dengan kode etik. Kedua, dosen atau pegawai yang tidak aktif mensosialisasikan.¹¹⁵

Menurut Ibu Linda dosen fakultas syariah, dalam pengamatan terkait model pakaian mahasiswa tidak bisa di sama ratakan. Ada sebagian mahasiswa yang sudah sopan etis memakai pakaiannya, ada yang masih pakai celana panjang ketat dan bajunya ketat di atas pinggul. Tapi sekarang justru ada yang sudah memakai baju gamis syar' I. karna ada sebagian yang sudah bagus, ada pula yang belum sesuai artinya mahasiswa fakultas syariah masih perlu pembinaan.¹¹⁶

Kemudian Ibu Nurnazli mengatakan, kalau dulu mahasiswa masih rapih, sopan, dan bersih, tidak boleh memakai jeans, ketika masih dibawah kepemimpinan Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA harus sesuai dengan peraturan kode etik tapi sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Ternyata di dalam penerapan ada kelemahan karna ada beberapa dosen yang tidak peduli misalnya dalam kode etik pakaian seperti memakai jeans dan kaos oblong, dengan berpendapat yang penting rapih, bersih, jadi tidak dipemasalahkan. Kalau diamati sekarang malah lebih banyak yang tidak mengindahkan kode etik.¹¹⁷ Sama hal yang dikemukakan oleh Bapak Gandhi, selagi tidak melewati batas kesusilaan tidak menjadi masalah, namun aturan tidak akan seratus persen kalau tidak ada sanksi, tapi kalau

¹¹⁵Wawancara Alamsyah (Dekan Fakultas Syariah) dan Khairuddin (Wakil Dekan I) pada tanggal 16 April 2019

¹¹⁶Wawancara Linda Firdawaty(Dosen Fakultas Syariah) tanggal 27 Maret 2019

¹¹⁷Wawancara Nurnazli(Dosen Fakultas Syariah) tanggal 27 Maret 2019

tidak ada sanksi itu namanya himbauan. Jadi jangan heran jika ada yang tidak mematuhi karena bentuk himbaun boleh dilakukan boleh tidak.¹¹⁸

Selanjutnya Bapak Mundzir dosen fakultas syariah juga mengatakan, secara umum sudah sering memperingati dan menegur mahasiswa yang berpakaian tidak sesuai kode etik, artinya dapat disimpulkan anak-anak mahasiswa syariah kalau ditinjau dari segi etika berpakaian belum mencerminkan sebagai mahasiswa Islam.¹¹⁹

Sama hal menurut Pengamatan Bapak Kumedi Ja'far, masih ada sebagian mahasiswa yang tidak mengindahkan kode etik.¹²⁰ hal ini bisa terjadi. Pertama, dari aspek teoritis yaitu dari aturannya yang dibuat ketidakjelasan atau ambigu kemungkinan tumpang tindih. Kedua, dari aspek manusia, khususnya dosen atau pemegang kebijakan karna perbedaan persepsi dari kalangan dosen dan pimpinan bisa menjadi penyebab terjadinya pelanggaran. Ketiga, dari aspek sosialisasi yang kurang intensif dilakukan. Jadi upaya agar mahasiswa mematuhi kode etik adalah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum atau kode etik yang berlaku, sosialisasi pada mahasiswa baru tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan penegakan kesepahaman dari semua unsur terkait peraturan kode etik.¹²¹

¹¹⁸Wawancara Gandhi Liyorba Indra (Sekretaris Jurusan Akhwal Syahsiyah) tanggal 15 Mei 2019

¹¹⁹Wawancara Mundzir (Dosen Fakultas Syariah) tanggal 25 Maret 2019

¹²⁰Wawancara Kumedi Ja'far (Ketua Jurusan Muamalah) tanggal 25 Maret 2019

¹²¹Wawancara Marwin Ketua Jurusan (Akhwal Syaksiyah) tanggal 25 Maret 2019

Dalam hal ini, Bapak Susiadi selaku ketua jurusan siyasah membenarkan kenapa pelanggaran kode etik mahasiswa itu bisa terjadi, beliau mengatakan dalam penyeleksian mahasiswa itu ada tiga macam. Pertama, mahasiswa masuk melalui jalur SPAN kita tidak tahu dan tidak paham latar belakangnya apa, yang penting nilai bagus. Kedua, mahasiswa masuk melalui tes wawancara, ini diperhatikan harus bermoral, ada ukurannya minimal bisa baca al- quran, etikanya harus pakai jilbab, berpakaian sopan tidak memakai kaos, perkataan harus sopan. Ketiga, memang mahasiswa sejak dari dulu SLTA nya menampilkan ketidak disiplinannya, memang ada satu dua bukan karena dia sudah masuk ke perguruan ini. Bandingkan anak yang keluar dari Pondok, MAN, MA yang cukup tinggi kedisiplinannya jadi memahami etika, tapi kalau dari sekolah atau kebiasaan dari rumah kurang memahami etika ini akan terbawa ke perguruan tinggi. Untuk itu mengubah perilaku setiap individu dimulai dari rumah, kalau di kampus hanya memberikan semacam soft skills atau semacam wawasan tentang kampus misalnya, pergi pakai baju putih keluar juga pakai baju putih, tapi tidak semuanya seperti itu. Menurut bapak peraturan kode etik sudah bagus, cuma karna kita sekolah tinggi universitas islam berbaju putih nodanya lebih nampak dari pada sekolah umum, sedangkan sekolah umum bisa jadi lebih banyak yang melanggar kode etik. Untuk itu, agar mahasiswa fakultas syariah mematuhi peraturan kode etik diperlukan upaya yaitu semua akademika harus kompak dan memberikan contoh yang baik, tidak hanya pimpinan tapi seluruh dosen,

karyawan termasuk mahasiswa. Berikan wawasan dan nasehat sesuai dengan visi dan misi kampus mencerdakan dan berakhlakul karimah. Mengenai mahasiswa apabila melanggar kode etik, kalau bicara normative siapa yang melanggar sanksi hukum harus dikenakan, tapi karna pendekatan ini adalah pendekatan akademis hanya sebagai pengawas sekaligus pendidik ada prosedurnya. Pertama, di panggil. Kedua, di peringatkan. Ketiga, di berhentikan dari kampus.¹²² Pendapat ini samadengan yang dikemukakan oleh Bapak Frenki selaku Sekretaris Jurusan Siyasah.¹²³

Kemudian, untuk mengetahui hasil penelitian dari data mahasiswa yang banyak jumlahnya, maka penulis menggunakan kuesioner. Hal ini agar memudahkan penulis menyebarkan pertanyaan terkait penelitian kepada responden. Selain itu, di dukung dari wawancara mahasiswa ketika penyebaran kuesioner untuk melengkapi dan memperjelas data lapangan dalam menjawab kuesioner.

1. Banyak mahasiswa cukup paham adanya kode etik dengan jumlah tanggapan 336 atau sekitar 85%. Sedangkan hanya 60 orang atau sekitar 15% yang paham adanya kode etik khususnya dari segi berpakaian. Hal ini menimbulkan alasan seperti, kurangnya sosialisasi secara langsung sehingga hanya dapat dipahami oleh beberapa orang saja.

¹²²Wawancara Susidi (Ketua Jurusan Siyasah) tanggal 27 Maret 2019

¹²³ Wawancara Frenki (Sekretaris Jurusan Siyasah) tanggal 15 Mei 2019

2. Tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap kode etik dari hasil kuesioner, 92% responden mengatakan kurang patuh, terutama dari segi berpakaian. Hal ini menimbulkan beberapa alasan seperti, sanksi yang kurang tegas, sebagian dosen membiarkan atau tidak memberikan teguran, dan standar kode etik terlalu tinggi sehingga mahasiswa/ mahasiswi sulit menyeimbangkan kode etik yang ditetapkan kampus.
3. Dari data pendukung wawancara ketika penyebaran kuesioner, penulis mendapat keterangan dari beberapa mahasiswa/ mahasiswi yang secara acak dipilih, beberapa mahasiswa mengakui akan mematuhi kode etik berpakaian, sesuai dosen atau jam perkuliahan yang diikutinya atau duduk dibangku belakang agar tidak terlihat secara jelas. Sebaliknya jika dosen tidak menegur atau memberi sanksi sesuai kontrak belajar di awal, mahasiswa/ mahasiswi akan dengan sengaja tidak mematuhi kode etik.

Dari 3 (tiga) hasil keterangan di atas untuk lebih jelasnya sebagaimana table dibawah ini:

TABEL 1
JAWABAN 396 RESPONDEN TERHADAP KODE ETIK

Jawaban Responden		Jumlah Tanggapan Responden	Per(%)
1	Paham	60	15%
	Cukup Paham	336	85%
	Tidak Paham	0	0%
2	Dibutuhkan	396	100%
	Tidak dibutuhkan	0	0%
3	Buku panduan kode etik mahasiswa	160	41%
	Sosialisasi fakultas	60	14%
	Dari dosen	176	45%
4	Sudah sesuai dengan kode etik	92	23%
	Sebagian belum sesuai dengan kode etik	270	68%
	Tidak sesuai dengan kode etik	34	9%
5	Kurang sosialisasi	150	38%
	Sanksi kurang tegas	200	50%
	Standar kode etik terlalu tinggi	46	12%
6	Sudah patuh	30	8%
	Kurang patuh	366	92%
7	Iya	396	100%
	Tidak	0	0%

Berdasarkan table ini dapat dilihat bahwa kode etik berpakaian 100% dibutuhkan oleh mahasiswa, namun terkait penerapan menunjukan ketidakseimbangan mahasiswa/ mahasiswi dalam mematuhi kode etik, dari 396 responden atau 100% mahasiswa, diketahui yang sudah sesuai dengan kode etik hanya 23%, sedangkan sebagian belum sesuai dengan kode etik 68% dan yang tidak sesuai dengan kode etik 9%.

BAB IV

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 260 TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Hasil penelitian lapangan dilingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, secara keseluruhan dalam pelaksanaan Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa sudah berjalan, terkait peraturan kode etik yang memang sudah dilaksanakan secara langsung oleh fakultas syariah melalui sosialisasi yang dilakukan pimpinan dan dosen fakultas. Hal ini bisa dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan pimpinan fakultas, seperti banner atau spanduk ada di setiap gedung fakultas dan terlampir di absensi agar dosen atau mahasiswa memahami adanya peraturan kode etik. Walaupun secara praktik terdapat dinamika social yang berimbas ada yang tidak memahami peraturan kode etik dan melanggar peraturan tersebut. Karena secara keseluruhan mahasiswa mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan lingkungan pergaulan yang dapat mempengaruhi perilaku setiap individu.

Poin-poin penting yang menjadi objek analisa adalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kode etik mahasiswa, dari hasil wawancara dan kuesioner yang dilakukan peneliti dilapangan.

Sebagaimana sudah dijelaskan di bab terdahulu bahwa salah satu tugas pemimpin, agar melakukan sendiri inspeksi (pemeriksaan) atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam QS: Sad : 26. (lihat pada bab 2, halaman 34). Allah SWT tidak semata-mata

memberikan mandat tanpa wewenang untuk bertindak dan tidak memberikan toleransi baginya untuk mengikuti hawa nafsunya sehingga menyifatnya sebagai sesat. Meskipun ia mempunyai hak atasnya berdasarkan agama dan jabatan sebagai pemimpin, namun ia termasuk bagian dari hak-hak politik seluruh masyarakat terutama di dalam kampus. Sebagaimana juga dijelaskan “setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya.” (HR. Bukhari) (lihat pada bab 2, halaman 35). Dalam hadist ini sudah jelas, bahwa kode etik tidak hanya dilaksanakan oleh pemimpin, tapi seluruh masyarakat kampus, baik staf akademik maupun dosen merupakan dewan pengawas dalam membantu pimpinan agar terlaksananya kode etik mahasiswa khususnya berpakaian, namun dalam kenyataan dilapangan, kesepahaman dalam membantu mengawasi hanya dijalankan oleh beberapa dosen saja terutama dalam lingkungan fakultas syariah.

Selain itu, setiap manusia sejak lahir difitrahkan mempunyai akhlak yang baik. Bahkan agama Islam adalah akhlak, Maksudnya terkandung dalam kata-kata Aisyah yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah Saw yang artinya “Akhlaknya (Rasulullah) adalah Al-Qur’an.” Akhlak Rasulullah yang dimaksudkan ialah kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah Saw yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Qur’an. Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Swt. Sebagai orang mukmin sangat wajib untuk meniru budi pekerti dan keluhuran akhlaknya.

Akhlak berarti etika, dapat diketahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut. *Pertama*, dilihat dari segi objek pembahasannya,

mengenai perbuatan yang dilakukan manusia. *Kedua*, dilihat dari segi sumbernya, mengenai akal pikiran dan filsafat. *Ketiga*, dilihat dari segi fungsinya, mengenai etika sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. *Keempat*, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relative yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan ketentuan zaman.

Kemudian telah dijelaskan juga di bab terdahulu, berdasarkan wahyu illahi dalam menyempurnakan akhlak setiap individu harus memiliki akhlak terpuji (mahmudah) dan mampu menghindari akhlak tercela (mazmumah). Akhlak terpuji merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah, yang meliputi; *Pertama*, etika dalam berpakaian, pakaian yang dipakai seseorang hendaknya menutup aurat dan ada beberapa kriteria pakaian yang harus diperhatikan dalam menutup aurat yakni tidak tipis, lebar dan tidak sempit, panjang dan mampu menutup seluruh aurat baik laki-laki maupun wanita. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab [33] : 59 (lihat pada bab 2, halaman 52). *Kedua*, Iffah, memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak dan menjatuhkannya. *Ketiga*, Malu, sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau tidak baik. Sifat malu dapat dibagi kepada tiga jenis yakni, malu kepada Allah SWT, malu kepada diri sendiri, malu kepada orang lain.

Karna itu, untuk meluruskan etika setiap individu dalam teori Lawrance Green (1991) (lihat pada bab 2, halaman 49) menyebutkan ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku individu maupun kelompok, yaitu: 1) Faktor Penentu (*predisposing factors*), yaitu meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan,

keyakinan, nilai-nilai dan persepsi seseorang yang menjadi dasar motivasi individu atau kelompok untuk bertindak. Misalnya kesadaran seseorang dalam bersikap yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak berkaitan dengan moral. 2) Faktor pendukung (*enabling factors*), meliputi keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk menunjang perilaku. Misalnya di adakan kegiatan pembinaan mental spiritual untuk meningkatkan iman terutama dalam berperilaku. 3) Faktor pendorong (*reinforcing factors*), yaitu faktor yang memperkuat perubahan perilaku seseorang yang dikarenakan adanya sikap dan perilaku yang lain. Misalnya meningkatkan kesepahaman dalam pengawasan terkait peraturan-peraturan yang akan ditegakan.

Berdasarkan uraian di atas, tugas pemimpin maupun dosen dalam perspektif fiqh siyasah dilingkungan fakultas syariah UIN Raden Intan lampung, tidak sepenuhnya memperhatikan keadaan di lapangan dan sanksi yang ditetapkan tidak tegas karena kurangnya kesepahaman dalam menerapkan kode etik. Sedangkan akhlak mahasiswa dilingkungan fakultas syariah belum sepenuhnya mencerminkan perilaku yang diajarkan agama Islam. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan baik mahasiswa, dosen, dan pimpinan fakultas, bahwa tingkat kesadaran mahasiswa terhadap kode etik berpakaian masih kurang Sehingga walau dikatakan banyak yang mematuhi peraturan kode etik tetapi masih banyak juga yang melanggar peraturan tersebut

Menurut peneliti, Implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa dalam Perspektif Fiqh Siyasah khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. *Pertama*, tidak berjalan sesuai dengan kode

etik yang dikeluarkan oleh Rektor. *Kedua*, terkait etika berpakaian banyak mahasiswa maupun mahasiswi yang berpakaian tidak sesuai dengan kode etik. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam berperilaku, faktor kebiasaan yang berkenaan dengan lingkungan seperti latar belakang pendidikan sebelumnya dan keluarga, faktor perkembangan zaman yang mempengaruhi dalam mengikuti mode terbaru terutama segi berpakaian dan sanksi yang ditetapkan dalam kode etik berpakaian tidak tegas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa menurut perspektif fiqh siyasah khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, sudah berjalan namun tidak sesuai dengan kode etik yang dikeluarkan oleh Rektor dan terkait etika berpakaian banyak mahasiswa maupun mahasiswi yang berpakaian tidak sesuai dengan kode etik. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dalam berperilaku, faktor kebiasaan yang berkenaan dengan lingkungan seperti latar belakang pendidikan sebelumnya dan keluarga, faktor perkembangan zaman yang mempengaruhi dalam mengikuti mode terbaru terutama segi berpakaian dan sanksi yang ditetapkan dalam kode etik berpakaian tidak tegas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hal ini dan berbagai pelanggaran terjadi penulis menyarankan:

1. Adanya revisi atau pembaharuan lagi mengenai Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa yang sesuai dengan keadaan sekarang, seperti pada sosialisasi secara menyeluruh, penegasan sanksi dan pemerataan petugas kedisiplinan di setiap gedung khususnya Fakultas Syariah.
2. Perhatian pimpinan maupun dosen untuk lebih meningkatkan lagi kesepahaman dalam menerapkan kode etik mahasiswa.
3. Perlu adanya kegiatan pembinaan mental spritirual mahasiswa dari fakultas untuk lebih meningkatkan iman terutama kesadaran dalam berbusana.

Harapan penulis, baik pimpinan, dosen, khususnya mahasiswa dapat menerapkan kode etik yang diiringi pedoman agama Islam sehingga apa yang menjadi tujuan kampus sesuai dengan apa yang dicitakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011
- Pedoman Akademik Keputusan Rektor Nomor 260 Tahun 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Lampung
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Salam, Burhanuddin, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000
- Rahmat, Jalaludin, *Dahulukan Akhlak di atas Fiqh*, Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2007
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986
- Muhammad, Abdul, Khadir, *Hukum dan Politik Hukum*, Bandung: Citra Ditya, 2014
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000
- Meleong, Lexi. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Sukarame: Seksi Penerbitann Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA CV, 2015
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004

Sorkanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986

Pulungan, J.Suyuthi, *Fiqh Siyasah: ajaran sejarah dan pemikiran*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta:PT Raia Grafindo Persada, 1997

Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Ramburambu Syariah*, Ed. Rervisi, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, Cet. 6, 2016

Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'I wa al-Ra'iyat*, Dar al-Kutub al-Arabiyyah, Bairut, 1966

Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2009

Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Ed. Pertama, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Muda, Abdul Latif , *Pengantar Fiqh*, Bandung: Pustaka Salam, 1997

Taj, Abd al- Rahman, *Al- Siyasah al- Syar'iyah wa al Fiqh al- Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993

Zuhalli, Wahbah az, *Ushul Fiqh Kuliyyat Da'wah Al Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama: 1997

Khallaf , Abd al- Wahab, *Al- Siyasah al- Syar'iiyyah*, Kairo: Dar Al- Ansar, 1977

Salus, Ali As, *Imamah & Khilafah Dalam Tinjauan Syar'I*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

IMAM AL-MAWARDI, 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Cet. 1, Jakarta: Gemma Insani Press

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Juz II, No. 893, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013

Rozak , A Ubaedillah & Abdul, *Pendidikan Kewarga[Negara]an (Civic Education)*, Ed. Revisi, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2003

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, Ed.6 Cet.11, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004

Sa'aduddin, Iman Abdul Mukmin, *Meneladani Akhlak Nabi: Membangun Kepribadian Muslim*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006

al-Bugha, Musthafa Dib, *Al-Wafi diterjemahkan dari Al-Wafi fi Syarh Al-Arbain An-Nawawiyayah*, Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2007

bin Khaldun , Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad, *Mukaddimah*, ter. Masturi Ilham dkk Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014

Mawardi, 'Ali bin Muhammad al, *al- Ahkam al- Sulthaniyyah wa al Wilayat al- Diniyyah* , Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyyah, 2006

Bahantsi , Ahmad Fathi (t.t), *al-Siyasah al-Jina'yyah Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Beirut: Dar al- Fikr

Ma'luf, Lois, *Al- Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A'alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986

bin Manzhur Abu al-fadhl al-Din Muhammad bin Mukram, *Lisan al- 'Arab*, Vol.VI. Beirut: Dar Shadir, 1968

Nata, Abuddin, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, Ed. Revisi Cet. 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Amien, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, cet. Ke-3, Jakarta: PT Tri Handayani Utama, 1983

Amin, Samsul Munir, *Ilmu Akhlak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016

Ilyas , Yunahar, *Kuliah Akhlak*, cet. II, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2000

Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Tualeka, Hamzah, et. all., *Akhlak Tasawuf*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011

Dkk, Aminuddin, *Pendidikan Agama*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014

as-Sayyid, 'Abdul azizbin Fathhi, *Ensiklopedi Adab Islam menurut al-Quran dan as-Sunnah*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2007

Jumhuri, Muh. Asroruddin Al, *Belajar Aqidah Akhlak*, Yogyakarta: Deepublish, 2015

Mahjuddin, *Kuliah Akhlak Tasawuf*, Jakarta: Kalam Mulia, 1991

Ali Mustafa Ya'kub. "Empat Prinsip Umum Berpakaian dalam Islam", (On-line) tersedia di : <https://bincangsyariah.com/nisa/empat-prinsip-berpakaian-dalam-islam/> (1 Juni 2019)

Sejarah UIN Raden Intan Lampung, (On-line) tersedia di : <https://www.radenintan.ac.id/sejarah-singkat/> (25 Maret 2019)

Liky Faizal, "Perempuan Dalam Politik: Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an", *dalam Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, 2016

Hawi, Akhmal, Filsafat Pendidikan Islam Perspektif Pemikiran Pendidikan Al-Ghazali, dalam jurnal *TASAMUH*, VOL. 1, NO. 1, 1 Juni 2015

